

Edisi 1/Januari-Februari 2012

PROGRES



MEDIA KOMUNIKASI TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)



Program *Cash for Work*

Program *Cash for Work* telah membantu warga yang tertimpa musibah bencana erupsi Gunung Merapi. Program ini juga memulihkan semangat penduduk untuk kembali menata kehidupan mereka.

TAHAP I

Jumlah Kabupaten	4 kabupaten
Jumlah Kecamatan	10 kecamatan
Jumlah Desa	48 desa
Tenaga Kerja Terserap	18,294 orang
Jumlah Hari Orang Kerja	207,353 HOK
Jumlah Kelompok	577 Kelompok



Gambar: Pelaksanaan *Cash for Work* dengan pekerjaan pembuatan saluran air bersih di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. (foto: dokumentasi Kepala Dusun Pule, Magelang)

MENEKAN ANGKA KEMISKINAN MELALUI MP3KI

Basis Data Terpadu, Terobosan Besar Identifikasi Penduduk Miskin
Master Plan untuk Meningkatkan Kesejahteraan



SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

TNP2K

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan



INSTRUMEN UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KELOMPOK PROGRAM I

BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA

TUJUAN:

Mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

KELOMPOK PROGRAM II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TUJUAN:

Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

KELOMPOK PROGRAM III

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL

TUJUAN:

Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Sekretariat TNP2K :
Grand Kebon Sirih Lt 4-6,
Jalan Kebon Sirih No 35
Jakarta Pusat 10110
• Telp 62-21-3912812
• www.tnp2k.wapresri.go.id



KEGIATAN TNP2K JANUARI-FEBRUARI 2012

Tanggal	Kegiatan
Selasa, 3 Januari 2012	RAPAT PEMBAHASAN PAGU RASKIN 2012
Kamis, 12 Januari 2012	RAPAT PNPM DENGAN AUSAID
Kamis, 12 Januari 2012	RAPAT RENCANA AKSI GERAKAN NASIONAL INDONESIA BERSIH
Senin, 16 Januari 2012	RAPAT PLENO TNP2K
Kamis 19 Januari 2012	RAPAT POKJA KESEHATAN DENGAN GIZ
Kamis, 9 Februari 2012	RAPAT BERSAMA DENGAN DPRD KOTA MATARAM
Senin, 20 Februari 2012	RAPAT POKJA PENGENDALI KLASTER 1
	RASKIN & MSC TRAINING
	RAPAT POKJA KEBIJAKAN PNPM
	RAPAT POKJA KESEHATAN
Rabu, 22 Februari 2012	DISKUSI MONEV DENGAN POLEWALI MANDAR
	ORIENTASI POKJA PENGENDALI KLASTER 1
	RAPAT POKJA KESEHATAN
Kamis, 23 Februari 2012	RAPAT MONEV DAN TIM DATA INFORMASI
	RAPAT POKJA KESEHATAN DENGAN WORLD BANK
	INTERNAL MEETING WITH MONEV AND CLUSTER 1 AND 3
	DISKUSI DENGAN PMD
Jumat, 24 Februari 2012	DISKUSI TNP2K DENGAN BPK
	RAPAT ADVOKASI
	PERSIAPAN BLSM
Senin, 27 Februari 2012	PERBAIKAN PERLUASAN PKH
	KONSULTASI TEKNIS TKPK KABUPATEN BADUNG
	RAPAT PERSIAPAN INPRES MENGENAI BLSM
	RAPAT KOMPENSASI BBM
Selasa, 28 Februari 2012	RAPAT MONEV DAN KLASTER 1
	DISKUSI INTERNAL TIM ADVOKASI
Rabu, 29 Februari 2012	RAPAT POKJA PNPM - TNP2K, ROAD MAP PNPM MANDIRI
	RAPAT MONEV DAN KLASTER 1
	RAPAT DENGAN KONSULTAN KAJIAN APBN
	RAPAT POKJA PNPM - TNP2K, ROAD MAP PNPM MANDIRI

Galeri Foto



Tim Pansus Raperda. Anggota DPRD Kota Mataram yang tergabung dalam Tim Pansus Raperda tentang Persampahan, Perparkiran, serta Penanggulangan Kemiskinan Kota Mataram, pada Kamis malam (9/2/12) mengunjungi sekretariat TNP2K. Tim yang dipimpin oleh Mishban dari Partai Pemuda Indonesia itu diterima langsung oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto bersama Tim Pokja, Staf Sekretariat dan Kepala Sekretariat Tonno Supranoto. Dalam kesempatan itu, Bambang Widianto memberikan pengetahuan dasar tentang kemiskinan, mulai dari metode dasar penentuan kriteria miskin hingga penghitungan tingkat kemiskinan.



Cover : Perajin kemplang panggang khas Palembang menjemur kemplang di Kampung Kemplang Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, Sumatera Selatan. Hampir seluruh warga di kawasan tersebut menggantungkan hidup sebagai perajin kemplang berbahan baku sagu dan ikan, dimana setiap hari sedikitnya 50 ribu kemplang diproduksi. Nila Fu'adi.

Kombinasi Dua Program Percepatan untuk Indonesia Sejahtera

Kendati Indonesia adalah negara yang paling berhasil menurunkan angka kemiskinan, akan tetapi masih terdapat disparitas antar provinsi. Ada provinsi yang berhasil menurunkan persentase penduduk miskinnya dengan cepat dan ada pula yang lambat. Untuk itu upaya pengentasan kemiskinan tetap menjadi agenda utama pembangunan pemerintah. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), dengan tujuan menjaga penurunan tingkat kemiskinan sesuai target.

Rancangan MP3KI ini terdiri dari pilar utama yaitu bantuan-bantuan sosial (klaster satu), PNPM Mandiri (klaster dua), kredit usaha rakyat (klaster tiga) dan listrik murah untuk rakyat, rumah murah untuk rakyat, air bersih untuk rakyat, angkutan pedesaan, pengentasan kemiskinan nelayan dan kota (klaster empat). Setelah program MP3KI dilaksanakan, diharapkan dalam tiga tahun mendatang angka kemiskinan di Indonesia akan menurun secara signifikan. Program ini akan dikombinasikan dengan program Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang sudah diluncurkan terlebih dahulu. Dengan kombinasi dua program percepatan tersebut diharapkan akan lebih

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan.

MP3KI merupakan *affirmative action* sehingga pembangunan ekonomi yang terwujud tidak hanya *pro-growth*, tetapi juga *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-environment*, ter masuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Dengan sasaran menurunkan tingkat kemiskinan hingga 4-5% pada tahun 2025, meningkatkan kesempatan kerja, pembangunan yang merata di seluruh tanah air, dan pertumbuhan yang tinggi, inklusif dan berkeadilan.

Dua program pemerintah yakni MP3EI dan MP3KI kami pilih sebagai salah satu topik dalam edisi majalah Progres kali ini. Kami ingin seluruh komponen masyarakat dapat memberikan peran sertanya terhadap dua mega program pemerintah ini. Selain dua topik hangat tersebut kami juga menyampaikan program pengentasan kemiskinan klaster 4 yang mulai diimplementasikan tahun ini. Pada program klaster 4 ini tak hanya kaum miskin di pedesaan atau daerah tertinggal saja yang diperhatikan. Mereka yang tinggal di kota dan tergolong miskin juga akan disentuh oleh program ini. Berita-berita menarik lainnya juga dapat pembaca temui di edisi Progres kali ini. Kami berharap apa yang kami sajikan ini dapat memberi manfaat bagi pembaca sekalian. Selamat membaca. ■

Pelindung :
Wakil Presiden RI

Penasehat :

- Seswapres RI
- Deputi Seswapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan
- Staf Khusus Wapres Bidang Media Massa

Penanggung Jawab :
Kepala Sekretariat TNP2K

Pemimpin Redaksi :
Hamka Kurniawan

Staf Redaksi :
Irwansyah
K Kuncoro

Tata Letak / Artistik :
Sojarwadi

Alamat Redaksi:
Sekretariat TNP2K,
Gd. Grand Kebon Sirih Lt. 4
Jalan Kebon Sirih No. 35
Jakarta Pusat 10110
Telp. : 021-3912812
Fax. : 021-3912511, 3912513
Email : tnp2k@wapresri.go.id

Redaksi menerima tulisan, opini, foto dan surat pembaca yang diketik satu setengah spasi, panjang tulisan maksimal 2 halaman folio. Untuk tulisan dan opini panjang 5.000 karakter dengan disertai foto penulis dan biodata.

Laporan Utama

3 Pemerintah tengah menyiapkan program MP3KI untuk lebih mempercepat pengentasan kemiskinan. Targetnya mampu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia serendah mungkin.



Menekan Angka Kemiskinan melalui MP3KI

Pemerintah tengah menyiapkan program MP3KI untuk lebih mempercepat pengentasan kemiskinan. Targetnya mampu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia serendah mungkin.

Pemerintah tengah menyiapkan program MP3KI untuk lebih mempercepat pengentasan kemiskinan. Targetnya mampu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia serendah mungkin.



Membangun Negeri melalui MP3EI

Perluasan infrastruktur yang ada pada MP3EI merupakan upaya pemerintah untuk membangun negeri maju.

Perluasan infrastruktur yang ada pada MP3EI merupakan upaya pemerintah untuk membangun negeri maju.

Basis Data Terpadu, Terobosan Besar Identifikasi Penduduk Miskin



Basis Data Terpadu (BDT) merupakan terobosan besar dalam identifikasi penduduk miskin.

Basis Data Terpadu (BDT) merupakan terobosan besar dalam identifikasi penduduk miskin.



Kerjasama Penyaluran Dana Bantuan PKH

Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penyaluran dana bantuan PKH.

Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penyaluran dana bantuan PKH.

33 Badan Pusat Statistik telah menyerahkan hasil akhir Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

37 Tahun 2012 ini pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi sekitar 10,5 hingga 11,5 persen. Untuk itu berbagai upaya dilakukan. Di antaranya dengan mempermudah penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan.

Master Plan untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Program pengentasan kemiskinan MP3KI hadir dengan sasaran utama meningkatkan kesejahteraan 24% penduduk Indonesia yang masih tergolong miskin dan hampir miskin.

Sasaran utama...
Sasaran utama...
Sasaran utama...

14 Program pengentasan kemiskinan MP3KI hadir dengan sasaran utama meningkatkan kesejahteraan 24% penduduk Indonesia yang masih tergolong miskin dan hampir miskin.

Tim Pansus DPRD Kota Mataram Kunjungi TNP2K

Tim Pansus DPRD Kota Mataram mengunjungi TNP2K untuk membahas program pengentasan kemiskinan.

Tim Pansus DPRD Kota Mataram mengunjungi TNP2K untuk membahas program pengentasan kemiskinan.

41 Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah tentang penanggulangan kemiskinan Kota Mataram.



Perkampungan nelayan miskin di Bekasi, Jawa Barat.

Menekan Angka Kemiskinan melalui MP3KI

Pemerintah tengah menyiapkan program MP3KI untuk lebih mempercepat pengentasan kemiskinan. Targetnya mampu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia serendah mungkin.

Pemerintah telah menyiapkan MP3EI untuk mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi melalui pembangunan di enam koridor ekonomi. Upaya tersebut ditujukan untuk mempercepat peningkatan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam rangka memperluas kesejahteraan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka memaksimalkan manfaat MP3EI dan untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, diperlukan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). MP3KI merupakan *affirmative action* sehingga pembangunan ekonomi yang terwujud tidak hanya *pro-growth*, tetapi juga *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-environment*, termasuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program MP3KI ini akselerasi penanggulangan kemiskinan. Dengan sasaran menurunkan tingkat kemiskinan hingga 4-5% pada tahun 2025, meningkatkan kesempatan kerja, pembangunan yang



Rumah penduduk miskin di bantaran sungai di Jawa Barat.

merata diseluruh tanah air, dan pertumbuhan yang tinggi, inklusif dan berkeadilan.

Adapun pendekatan yang akan dilakukan mencakup pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan melalui integrasi/sinergi program pengentasan kemiskinan sesuai kondisi wilayah dengan melibatkan pemerintah, BUMN, Swasta, Masyarakat (P4: *Public-Private-People Partnership*). Di dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ini, pemerintah meluncurkan strategi dengan cara mengedepankan pelayanan kebutuhan dasar terlebih dahulu, baru kemudian pemberdayaan masyarakat/individu, dan akses untuk mendapat kesempatan berusaha dan bekerja.

MP3KI ini mempunyai kerangka dasar yang akan dijadikan acuan dalam berbagai pelaksanaan

program-program pengentasan kemiskinan. Kerangka dasar ini meliputi:

1. Strategi yang akan dijalankan yang mencakup pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat/individu untuk memanfaatkan peluang, dan akses untuk memanfaatkan peluang (akses berusaha/bekerja) serta perlindungan sosial secara menyeluruh.
2. Kebijakan yang terdiri dari kebijakan makro berupa kebijakan fiskal *pro-poor*, stabilitas harga, dan lain-lain. Kebijakan sektor yaitu kebijakan yang akan fokus kepada pertanian dalam arti luas. Dan yang terakhir adalah kebijakan regional, yang merupakan kebijakan pada kantong kemiskinan dan wilayah tertentu, dengan

basis keunggulan dan tipologi wilayah.

3. Sasaran yang akan di capai. Sasaran ini terdiri dari tiga bagian yaitu pengelompokan sasaran yang meliputi kelompok sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Pengelompokan ini berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Setelah dikelompokkan maka saran berikut adalah lokasi yang dituju yaitu kantong kemiskinan, daerah tertinggal, perbatasan, terpencil, dan terluar (di dalam maupun di luar koridor ekonomi). Adapun kelompok rentan yang meliputi nelayan, petani penggarap, miskin perkotaan, dan handicap adalah merupakan sasaran ketiga.
4. Pelaksanaan. Pelaksanaan program-program ini terbagi menjadi tiga sinergi:

1. Sinergi dan transisi klaster 1-4 dan program Penanggulangan Kemiskinan lainnya, dengan basis PPLS 2011;
2. Sinergi lokasi pelaksanaan berbagai program sesuai kebutuhan;
3. Sinergi kegiatan pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat.

Pemenuhan Pelayanan dan Kebutuhan Dasar yang merupakan bagian dari strategi MP3KI ini meliputi program-program: peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan kebutuhan dasar (pangan dll.), perluasan akses pelayanan: kesehatan dan pendidikan, dukungan terhadap kesamaan hak warga negara

(*inclusive citizenship*) serta jaminan hidup. Adapun strategi kedua yaitu pemberdayaan masyarakat mencakup: sinergi dan integrasi program-program pemberdayaan masyarakat, mendorong kemandirian melalui peran fasilitasi yang lebih besar dari daerah dan swasta, integrasi perencanaan partisipatif ke dalam perencanaan pembangunan regular, dukungan terhadap kewirausahaan, dukungan pelatihan untuk pengembangan kemampuan dan kewirausahaan, bagi individu maupun kelompok (organisasi masyarakat), peningkatan pemanfaatan jejaring kerja (*network*), *linkage* pada industri dan lembaga keuangan, dukungan pengelolaan aset secara profesional, dan institusionalisasi perencanaan partisipatif.

Peningkatan Akses (Pekerjaan, Usaha dan Wilayah) sebagai strategi ketiga, dijabarkan kedalam berbagai kegiatan berupa: Memberikan akses seluas dan semudah mungkin kepada masyarakat miskin untuk berusaha dan/atau memperoleh pekerjaan; Membuka keterisolasian wilayah sebagai prasyarat pendorong peningkatan perekonomian setempat; Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar; Memberikan alternatif seluas mungkin pada masyarakat miskin untuk dapat berusaha (akses informasi, permodalan, pendidikan/keterampilan, *market*); Dukungan iklim usaha & regulasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin; Perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur



Sekolah dengan sarana tidak layak di Kalimantan Tengah.



Penduduk miskin di perkotaan

bagi daerah-daerah terpencil/terluar/tertinggal; Serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur dasar.

Sedangkan perlindungan sosial yang dimaksud dalam strategi keempat adalah : Pengembangan sistem jaminan social; Perluasan cakupan dan layanan penerima manfaat; Pengembangan program bantuan sosial; Pelaksanaan program-program jaminan sosial secara bertahap; Secara bertahap mengurangi peran pemerintah menuju pada kemandirin masyarakat; Dan yang terpenting adalah Program bantuan sosial yang diberikan Pemerintah akhirnya akan terbatas.

Dalam program Jangka Pendek – Menengah MP3KI (2012-2014) ini terdiri dari empat klaster yaitu:

Klaster-1 meliputi Perlindungan Sosial yang akan dilaksanakan secara nasional atau menyeluruh yang terdiri dari program Raskin, Jamkesmas, BSM, dan PKH. Klaster-2 merupakan Pemberdayaan yang juga mencakup nasional berupa PNPM Mandiri. Klaster-3 yaitu Inklusif Keuangan (nasional) dengan program KUKM/KUR. Dan Klaster-4 adalah Pro-Rakyat yang pelaksanaannya pada lokasi/ kelompok tertentu, adapun program-programnya adalah peningkatan dan perbaikan listrik, air, angkutan, rumah, nelayan, penggarap, dan para miskin perkotaan. Dan ada pula program lainnya yang bersifat nasional yaitu konektivitas, sertifikasi tanah dan rumah, KB, hukum, politik dan handicap. Integrasi dan sinergi Klaster 1-4 dan lainnya dari sisi

penggunaan data sasaran, dan kondisi wilayah ini didukung oleh dana dari Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN (PKBL) dan Swasta (CSR).

Adapun Rencana Program Jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019 dan 2019-2025 adalah dengan seiring kenaikan pendapatan kegiatan afirmasi diharapkan bertahap menurun, sistem jaring social (SJS) nasional secara total dapat dikembangkan, dan pada akhirnya bantuan sosial akan terbatas.

Peran para pihak dalam MP3KI yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan swasta, masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Pemerintah Pusat dalam jangka pendek berperan sebagai penyelenggara utama penanggulangan kemiskinan

yang berkewajiban memfasilitasi peningkatan peran yang lebih besar dari para pihak dan mulai mengembangkan sistem jaminan sosial yang lebih *sustainable*. Adapun dalam jangka menengah panjang, Pemerintah Pusat sudah harus dapat menjalankan sistem jaminan sosial yang lebih mapan dan berkelanjutan, bersama para pihak untuk mendukung pendanaan program serta membangun sistem *rapid response*.

Pemerintah Daerah, dalam jangka pendek memang hanya berperan relatif kecil dalam penanggulangan kemiskinan dan merupakan komplemen dari program pemerintah pusat. Namun pada program jangka menengah-panjang, peran Pemerintah Daerah cukup penting yaitu sebagai pelaksana dan pendanaan program pengentasan kemiskinan serta berkewajiban memperluas kesempatan kerja dan usaha dengan mengajak para pihak di wilayahnya. Sedangkan BUMN berperan menjalankan program/kegiatan sesuai kebijakan badan usaha, dan berlangsung sporadis, mengembangkan CSR inovatif bagi akselerasi usaha/wilayah dan menyalurkan bantuan di wilayah hasil pemetaan bersama. Swasta bertugas menjalankan program/kegiatan sesuai kebijakan badan usaha, dengan bantuan lebih diorientasikan di wilayah usaha dan dituntut mengembangkan CSR inovatif bagi akselerasi usaha/wilayah serta menyalurkan bantuan di wilayah hasil pemetaan bersama.

Adapun masyarakat sebagai pihak penerima bantuan social dalam program jangka pendek diharapkan mulai berperan aktif dalam ikut mengentaskan kemiskinan di lingkungannya. Kemudian kedepan mereka diarahkan menuju kemandirian

dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di lingkungannya bersama para pihak dan sebagai penggerak asuransi sosial.

Dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan pada Klaster 1, bantuan dan jaminan sosial akan disalurkan kepada individu dan rumah tangga. Dengan sasaran optimalisasi program-program Klaster I berupa pemberian bantuan sosial secara terarah, dan pengembangan sistem jaminan sosial. Untuk kedepannya akan diupayakan menuju pengembangan program

dalam pengentasan kemiskinan Klaster I ini diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial berupa raskin, jamkesmas, beasiswa, pengembangan sistem jaminan sosial (bantuan dan asuransi sosial), pengenalan skema asuransi sosial, pengembangan program jaminan sosial dan perluasan pemanfaatannya, integrasi berbagai jenis jaminan sosial, pengenalan kepada masyarakat miskin, pengembangan program bantuan sosial terbatas, perluasan sistem jaminan sosial kepada masyarakat, penerapan secara



Kerajinan hasil UMKM

perlindungan sosial sebagai upaya perluasan program perlindungan sosial dengan target terarah (bantuan dan jaminan sosial). Yang kemudian berlanjut pada perluasan program perlindungan sosial. Perluasan ini akan mencakup program jaminan sosial yang akan dilaksanakan secara merata kepada masyarakat miskin namun diberikan secara terbatas.

Program-program nyata

terbatas program bantuan sosial dan transisi peran pemerintah kepada masyarakat secara luas (penjamin asuransi).

Sedangkan pengentasan kemiskinan Klaster 2 lebih ditujukan pada pemberdayaan masyarakat sendiri, sehingga dana yang akan diperbantukan disalurkan kepada kelompok masyarakat, bukan individu. Sasaran yang hendak dituju adalah pengembangan keberdayaan

masyarakat dengan cara mempertajam sasaran kelompok masyarakat penerima manfaat, meningkatnya efektivitas pembangunan partisipatif, meningkatnya akses pelayanan dasar, terutama di daerah terpencil dan terisolir (*physical assets*), dan meningkatnya *Good Governance*. Hal ini merupakan harapan agar perluasan kemandirian masyarakat dapat terwujud, diantaranya adalah manajemen pembangunan partisipatif secara mandiri oleh masyarakat sehingga, masyarakat mampu dan mandiri membangun kemitraan dengan berbagai pihak, berkembangnya *Community Trust Fun*, serta berkembangnya perekonomian lokal yang mandiri.

Pada Klaster 3, tujuan utama lebih berkembang lagi yaitu pengembangan UMKM (Usaha

Mikro Kecil dan Menengah) sebagai kelompok sasaran. Adapun usaha-usaha yang akan dilakukan adalah meningkatkan kapasitas usaha UMKM, meningkatkan daya tahan usaha, dan menguatkan kapasitas untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan. Adapun intervensi pemerintah dan badan terkait dalam program ini mencakup peningkatan akses ke permodalan; peningkatan kapasitas SDM; peningkatan akses pemasaran; peningkatan kualitas produksi; penguatan kelembagaan; dan pemetaan kelompok sasaran.

Usaha UMKM tersebut akan dibina agar mempunyai daya tahan yang kuat melalui dukungan diversifikasi sumber permodalan; peningkatan penerapan teknologi dan standarisasi produk; dukungan diversifikasi pasar; peningkatan kompetensi teknis dan manajerial

SDM; peningkatan iklim usaha; dan registrasi kelompok sasaran. Sedangkan stabilitas usaha diarahkan kepada peningkatan inovasi produk; peningkatan produktivitas tenaga kerja; penguatan pasar; penguatan dukungan iklim usaha; dan registrasi kelompok sasaran.

Klaster 4 pengentasan kemiskinan (2012-2014) sendiri akhirnya akan lebih mengarah pada program-program yang Pro-Rakyat melalui pendekatan sektoral/wilayah. Program-program tersebut diantaranya pengadaan rumah murah dan sangat murah; kendaraan angkutan umum murah; air bersih untuk rakyat; listrik murah dan hemat; peningkatan kehidupan nelayan; peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan serta peningkatan kehidupan petani dan masyarakat perdesaan. ■ **Ratih Caroko**



Warga kesulitan air bersih



PROGRES-84

Membangun Negeri melalui MP3EI

Pembangunan infrastruktur yang ada pada MP3I merupakan upaya pemerintah untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

Program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia) diluncurkan pada 27 Mei 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peluncuran MP3EI ditandai dengan dimulainya proyek-proyek *groundbreaking* yang pen-

canangannya dipusatkan pada empat lokasi, yaitu Sei Mangke Sumatera Utara, Cilegon Jawa Barat, Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Timika Papua.

Visi MP3EI yaitu membawa Indonesia menjadi Negara maju melalui pertumbuhan

ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu:

1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan *value chain* proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA, geografis



Pembangunan infrastruktur jembatan

wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional.
3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju

innovation-driven economy. Menurut Presiden SBY kala itu ada lima penyakit yang membuat ekonomi Indonesia gagal dan meminta kepada jajarannya agar kelima penyakit ini diberantas. Pertama adalah birokrasi yang menghambat dan tidak sejalan, Kedua adalah sikap pemda yang mempunyai kepentingan sendiri dan cenderung menghambat jalannya perekonomian, Ketiga adalah pengusaha atau investor yang ingkar janji terhadap komitmen investasinya, Keempat adalah adanya regulasi yang menghambat jalannya perekonomian dan tidak segera

diperbaiki, dan Kelima adalah adanya kepentingan dan proses politik yang tidak sehat. MP3EI dirumuskan dengan semangat "*Business as Not Usual*". Semangat ini tercermin dalam 3 hal, yaitu:

1. MP3EI mengedepankan terobosan Strategi dan kebijakan. Titik berat pendekatannya pada solusi, bukan pada pendekatan masalah yang dihadapi.
2. MP3EI menitikberatkan pada percepatan transformasi Ekonomi dengan pendekatan peningkatan *value added*, mendorong investasi, mengintegrasikan sektoral dan

regional, serta memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya, dan

3. MP3EI mendengarkan masukan dan pendapat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan pemerintah daerah.

MP3EI diharapkan akan menjadi sebuah jalan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi kekuatan utama dunia. Indonesia berupaya menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia pada 2025 dan 8 besar dunia pada 2045. Setelah memiliki MP3EI maka untuk memastikan adanya penanggulangan kemiskinan secara signifikan maka pemerintah menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) tersebut.

Pemerintah pada rencana kerja 2012 menargetkan percepatan pengurangan kemiskinan dengan

Menurut Presiden SBY, ada lima penyakit yang membuat ekonomi Indonesia gagal:

- Pertama** adalah birokrasi yang menghambat dan tidak sejalan,
- Kedua** adalah sikap Pemda yang mempunyai kepentingan sendiri dan cenderung menghambat jalannya perekonomian khususnya nanti MP3EI ini,
- Ketiga** adalah pengusaha atau investor yang ingkar janji terhadap komitmen investasinya,
- Keempat** adalah adanya regulasi yang menghambat jalannya perekonomian dan tidak segera diperbaiki
- Kelima** adalah adanya kepentingan dan proses politik yang tidak sehat.

sasaran warga miskin di daerah tertinggal, warga miskin perkotaan dan nelayan melalui berbagai paket kebijakan. Desain masterplan percepatan pengurangan kemiskinan mensinergikan empat klaster mempertajam kelompok sasaran di kombinasikan dengan konektivitas, fleksibilitas dan peran pemerintah daerah. Jadi disatu sisi ada MP3EI tetapi juga *social protection*.

Program MP3EI di 2012 akan

terus digenot karena tahun ini merupakan tahun pembangunan infrastruktur bagi Indonesia. Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dana yang akan digunakan dalam pembangunan proyek selama satu tahun ke depan selama 2012 ini akan mencapai angka lebih dari Rp.1.000 triliun. "Ditambah proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dari APBN," imbuhnya. Pemerintah menargetkan program MP3EI di

Dermaga di wilayah kepulauan Indonesia timur





Infrastruktur jembatan

2012 yang akan di-*groundbreaking* sebanyak 84 proyek dengan total nilai Rp. 536,3 triliun.

Lebih lanjut ia mengatakan, dari 84 proyek tersebut yang didanai oleh pemerintah sebesar Rp.66,2 triliun untuk 15 proyek, BUMN Rp.90,3 triliun untuk 20 proyek, swasta Rp.301,6 triliun untuk 38 proyek, dan campuran Rp.78,2 triliun untuk 11 proyek. Sementara itu, capaian MP3EI sejak peluncuran MP3EI pada 27 Mei 2011 hingga Desember 2011 adalah 94 proyek kegiatan ekonomi dan infrastruktur telah dilakukan dan peletakan batu pertama pembangunan dengan nilai Rp.490,5 triliun. Dimana dana

Rp.490,5 triliun tersebut berasal dari pemerintah Rp.71,6 triliun untuk 24 proyek, BUMN Rp.131 triliun untuk 24 proyek, swasta Rp.168,6 triliun untuk 38 proyek dan campuran Rp.128,3 triliun untuk 8 proyek.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp.12-15 triliun untuk membangun infrastruktur yang mendukung program MP3EI. Anggaran ini sudah termasuk pengadaan lahan proyek-proyek infrastruktur tersebut. "Ada juga tambahan dana sebesar Rp.1,1 triliun dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk pembebasan lahan,

terutama lahan yang *high grade*," ujar Kepala Pusat Kajian Strategis Setjen Kementerian PU, Hedyanto W. Husaini.

Kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur dan permukiman yang sejalan dengan program MP3EI cukup besar. Kementerian PU memperkirakan, selama periode 2011-2014, dibutuhkan investasi hingga Rp.183,8 triliun. Selama periode tersebut PU hanya sanggup menyediakan dana sebesar Rp.50,356 triliun. Sisanya diharapkan berasal dari investasi swasta dan BUMN yang mencapai Rp.133,53 triliun.

Untuk tahun ini, PU memperkirakan nilai investasi

dukungan berupa regulasi. "Untuk jalan tol Surabaya, pemerintah sudah lebih dahulu membangun Jembatan Suramadu," jelasnya.

Nantinya jembatan ini akan dikaitkan dengan jalan tol Surabaya. Demikian pula dengan jalan tol Tanjung Priok, pemerintah sudah membangun jalan akses menuju jalan tol tersebut. "Kami tak ingin pemerintah banyak investasi tapi swasta diam. Karena disinyalir dana investasi swasta akan melengkapi APBN," tuturnya.

Dengan berbagai program pembangunan pada 2012 yang mendukung MP3EI tersebut, menurut Hatta Rajasa, merupakan upaya pemerintah mewujudkan target utama yang hendak diraih yaitu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi ke level yang pernah dicapai sebelum krisis 1997-1998.

"Pemerintah berupaya merealisasikan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2012 sebesar 6,7 persen dengan tingkat inflasi sebesar 5,3 persen dengan nilai tukar sebesar Rp.8.800 per USD," pungkasnya.

Apalagi Indonesia saat ini kembali menyabet peringkat investasi (*investment grade*) yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Pemerintah diminta tancap gas mempercepat pembangunan infrastruktur, meskipun melalui pinjaman. Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani. Dia menyambut positif pencapaian Indonesia dalam menyabet dua pengakuan dari tiga lembaga peringkat internasional.

Menurutnya, *investment grade* memang membuat suku bunga lebih rendah. Namun momentum ini harus dimanfaatkan juga oleh pemerintah, dengan mempercepat

proyek MP3EI. "Inilah saatnya pemerintah mempercepat MP3EI dengan pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus pro investor dengan memberikan kemudahan-kemudahan," jelas Aviliani.

Dia menyatakan, MP3EI merupakan kunci pertumbuhan ekonomi agar Indonesia bisa mengejar ketertinggalan pembangunan dengan negara ASEAN lainnya. Pemerintah harus mengimplementasikan proyek MP3EI disamping meneruskan proyek lain di luar megaprojek tersebut. Salah satunya adalah memfokuskan percepatan infrastruktur. Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) tersebut memprediksi, dalam waktu satu bulan ke depan, Indonesia kembali akan menyempurnakan pencapaiannya melalui perolehan *investment grade* dari Standard & Poor (S&P). Optimisme itu dinilai sebagai bukti perekonomian Indonesia tetap baik di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global akibat krisis Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menilai, kenaikan peringkat surat utang Indonesia menjadi *investment grade* menunjukkan sehatnya perekonomian nasional. Kenaikan peringkat akan mendorong investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI). Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution menambahkan, meski pencapaian *investment grade* akan memberikan keuntungan bagi perekonomian, tapi status itu bukanlah tujuan akhir pembangunan ekonomi Indonesia. Prestasi itu justru merupakan tantangan untuk memacu pertumbuhan ke tingkat potensialnya sekitar 7 persen.

■ Ratih Caroko

yang berasal dari sektor swasta mencapai sekitar Rp.33,37 triliun. Pemerintah berharap, investasi swasta tersebut akan terus meningkat. Untuk menarik minat investor, pemerintah akan memulai dengan beberapa proyek infrastruktur.

Hedyanto mencontohkan, pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumda) dengan nilai proyek sebesar Rp.5 triliun. Dalam proyek ini, pemerintah memberikan dukungan berupa pembangunan fisik lebih dahulu. Sementara untuk pembangunan proyek jalan tol Tanjung Benoa, Bali, pemerintah memberikan

Masterplan untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Program pengentasan kemiskinan MP3KI hadir dengan sasaran utama meningkatkan kesejahteraan 24% penduduk Indonesia yang masih tergolong miskin dan hampir miskin.



PROGRES-SIUK

Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak 1998-2011 terus menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan tersebut menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang ada pada Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang 2005-2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,8% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 12 pencapaian negara lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun, bahkan

India mencatat hasil minus.

Kendati Indonesia adalah negara yang paling berhasil menurunkan angka kemiskinan, akan tetapi masih terdapat disparitas antar provinsi. Ada provinsi yang berhasil menurunkan persentase penduduk miskinnya dengan cepat dan ada pula yang lambat. Untuk itu upaya pengentasan kemiskinan tetap menjadi agenda utama pembangunan pemerintah. Masterplan pengentasan kemiskinan pun kini sedang dipersiapkan. Hal ini diungkapkan

oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Saat ini pemerintah sedang merancang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Masterplan ini kini sedang dirancang oleh Bappenas dan segera akan diluncurkan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan bahwa sasaran program tersebut adalah 24 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 60 juta penduduk. Dengan rincian jumlah penduduk miskin 12,36 persen dan sangat miskin 12 persen, sehingga total 24 persen masyarakat Indonesia merupakan penduduk yang miskin dari total populasi sekitar 240 juta jiwa.

Rancangan MP3KI ini menurut Hatta terdiri dari pilar utama yaitu bantuan-bantuan sosial (klaster satu), PNPM Mandiri (klaster dua), kredit usaha rakyat (klaster tiga) dan listrik murah untuk rakyat, rumah murah untuk rakyat, air bersih untuk rakyat, angkutan perdesaan, pengentasan kemiskinan nelayan dan kota (klaster empat). Setelah program MP3KI dilaksanakan, diharapkan dalam tiga tahun mendatang angka kemiskinan di Indonesia akan menurun secara signifikan. Ia yakin akan hal itu, karena programnya akan dikombinasikan dengan program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang sudah diluncurkan terlebih dahulu. Dengan kombinasi dua program percepatan tersebut diharapkan akan lebih mempercepat laju pertumbuhan rakyat Indonesia.

Pada 2012 ini, pemerintah akan melaksanakan sejumlah paket kebijakan untuk meningkatkan

kesejahteraan penduduk, misalnya pembangunan rumah sangat murah, penyediaan air bersih, penyediaan listrik murah, peningkatan kualitas kehidupan nelayan dan penataan kawasan kumuh di perkotaan. Untuk paket pembangunan rumah sangat murah, hal yang dilakukan antara lain rehabilitasi perumahan nelayan, rehabilitasi perumahan masyarakat miskin di daerah tertinggal dan rehabilitasi

pendaratan ikan senilai Rp. 195 miliar, 200 desa di daerah tertinggal senilai Rp.197 miliar. Menko Perekonomian juga mengatakan paket penyediaan listrik murah akan diberikan bagi nelayan sebanyak 16.933 sambungan, untuk daerah tertinggal 12.000 sambungan. Sedangkan program peningkatan kehidupan nelayan akan di rangkul dalam sertifikasi hak tanah nelayan, perlindungan asuransi nelayan dan peralatan



Warga mengantre air bersih

AHMAD S

perumahan warga miskin perkotaan.

Pemerintah juga akan membangun perumahan bagi warga baru, warga negara Indonesia asal Timor-Timur sebanyak 31.983 unit. Sebanyak 141.983 unit rumah diharapkan dapat dibangun dengan anggaran Rp.1 triliun. Adapun daerah sebaran pembangunan dari mulai Papua, Papua Barat, Maluku hingga seluruh wilayah.

Untuk paket penyediaan air bersih, target bagi nelayan yaitu air bersih di 205 pangkalan

nelayan senilai Rp. 939,45 miliar. Selain itu pemerintah juga akan meningkatkan kualitas tempat pelelangan ikan (TPI) dan stasiun pengisian bahan bakar bagi nelayan.

Dalam pelaksanaan penyediaan rumah murah bagi nelayan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1,6 triliun bagi 15.000 nelayan di daerah-daerah pesisir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan, Tjijip Sharif, bahwa program rumah

gratis tersebut sesuai dengan program masterplan pemerintah di 2012. Program perbaikan rumah bagi nelayan miskin ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para nelayan, sehingga para nelayan mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi, dan orientasi mereka hanya melaut untuk mencari ikan tanpa berpikir lagi tentang kondisi rumah mereka.

Selain itu KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) juga akan menginvestasi desa per desa tiap kabupaten untuk menata dan meningkatkan kehidupan desa pesisir atau nelayan. Dalam melaksanakan program ini, kementerian bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Bantuan ini akan dipergunakan oleh masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan untuk meningkatkan pendapatan

dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat nelayan di setiap desa pesisir. "Bantuan ini kami utamakan untuk desa tertinggal di wilayah pesisir, sekaligus upaya pengentasan kemiskinan," ujar Sharif.

Desa pesisir yang akan mendapatkan bantuan di antaranya, wilayah Pulau Jawa, dan Kalimantan. Program ini diharapkan bakal menguatkan masyarakat pesisir secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebab, masyarakat pesisir di Indonesia masih menghadapi empat persoalan utama, yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan. Tahun lalu, angka kemiskinan mencapai 7,8 juta jiwa yang tersebar di 10.640 desa pesisir. Selain itu, masih tingginya kerusakan sumber daya pesisir, masih kurangnya kemandirian organisasi sosial

desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal. Yang terakhir, masih rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman.

Rektor IPB Profesor Herry Suhadiyanto, mengatakan pihaknya akan mempersiapkan tenaga ahli perikanan untuk melakukan penelitian di desa pesisir. Tujuannya, untuk mengetahui potensi sumber daya perikanan, lingkungan, dan ekologis lainnya. IPB juga akan melakukan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Kerja sama ini akan berjalan selama 5 tahun, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pesisir dan pulau-pulau kecil. "Ruang lingkup kesepakatan kerjasamanya adalah penelitian, pengembangan, pengkajian,

penerapan ilmu pengetahuan, dan ekologi,"ujarnya.

Selain memberikan program rumah murah, pemerintah juga akan membagikan 1.000 kapal gratis untuk nelayan pada tahun 2012 ini. Selain itu pengembangan seluruh pelabuhan di Indonesia juga diprioritaskan dalam perencanaan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Pembangunan pelabuhan-pelabuhan ini sebagai pendukung bagi para nelayan dalam bongkar muat hasil produksinya.

Adapun dana yang dibutuhkan dalam pembangunan pelabuhan di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai angka Rp.117 triliun. Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, dalam diskusi "Kesiapan Pelabuhan Mewujudkan Konektivitas Logistik Nasional dan ASEAN". Menurut Bambang Susantono, jumlah total hingga sebesar Rp. 117 triliun itu bukanlah jumlah yang dapat dikatakan besar mengingat Indonesia memiliki ratusan pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah di tanah air.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah juga akan menentukan pelabuhan mana saja yang akan dikembangkan sebagai pelabuhan lokomotif dan pelabuhan mana yang dikembangkan sebagai *gateway*. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, terdapat sebanyak 111 pelabuhan komersial, 614 pelabuhan nonkomersial, 472 terminal khusus, dan 721 terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di Indonesia. "Kami akan melakukan *regrouping* supaya berbagai pelabuhan bisa berfungsi secara maksimal," ujarinya.

Ia juga mengatakan, jumlah



Rumah keluarga miskin di pedesaan

Rp.117 triliun itu tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh satu pihak sehingga membutuhkan bantuan dari beragam badan usaha dan terbagi atas tiga jenis skema pendanaan. Beberapa skema pendanaan itu adalah prasarana khusus (untuk melayani kepentingan dari badan usaha bersangkutan), prasarana pada SEZ/FEZ (*Special Economic Zones/Free Trade Zones*), dan prasarana publik/komersial (untuk kepentingan publik secara luas dan diberlakukan pengenaan yang bersifat komersial atau pengenaan tarif).

Senada dengan Wamenhub, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II RJ Lino mengatakan, untuk memperbaiki infrastruktur memang dibutuhkan dana yang cukup besar. Pemerintah juga mesti selektif dalam menentukan infrastruktur yang harus diperbaiki dengan segera.

Sementara bagi masyarakat miskin perkotaan, pada 2012, akan dilakukan pembenahan pemukiman kumuh di sejumlah

kota antara lain Jakarta, Bandung, Makassar dan Medan serta Surabaya. Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial Wawan Mulyawan mengatakan, masalah kemiskinan di perkotaan jauh lebih kompleks meskipun jumlah penduduk miskinnya lebih sedikit dibandingkan pedesaan. Berdasarkan sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, penduduk miskin sebanyak 32,02 juta jiwa atau 13,33 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11,05 juta jiwa berada di perkotaan dan 18,97 juta jiwa di pedesaan.

Wawan mengatakan, masalah kemiskinan di perkotaan lebih kompleks karena tidak saja menyangkut pekerjaan, pendapatan, perumahan, tetapi berkait pula dengan masalah sosial lain yang bersifat patologis seperti ketunaan sosial, kerentanan terhadap kriminalitas dan tindak kekerasan, serta penyalahgunaan narkoba. "Kadang mudah dieksploitasi untuk kepentingan tertentu. Oleh





Rumah keluarga miskin di pedesaan

karena itu kemiskinan di kota sering dikatakan miskin plus, yaitu selain miskin mereka juga tidak jarang menjadi penyandang masalah sosial lain yang bersifat patologis," tuturnya.

Menurutnya, orang miskin di kota relatif lebih sulit kehidupannya bila dibanding dengan orang miskin di pedesaan. Sebab sumber daya utama orang untuk memenuhi kebutuhan hidup di perkotaan adalah uang. Di pedesaan, tanpa uang orang masih bisa makan dengan hasil kebun walaupun relatif sedikit. Tetapi di kota tanpa uang orang miskin tidak mungkin mendapatkan apa-apa kalau tidak mendapatkan bantuan dari orang lain. Selain itu, tingkat kepedulian masyarakat kota juga berbeda dengan masyarakat desa. Kesibukan dan tuntutan kebutuhan yang lebih banyak berdampak pada sifat individualitas masyarakat kota yang lebih tinggi dibanding masyarakat desa.

Desa lebih memiliki daya dukung berupa kepemilikan

sumber daya alam yang melimpah dengan tanah yang relatif luas, pemenuhan kebutuhan akan ruang mungkin tidak menjadi persoalan serius di pedesaan. Sangat berbeda kondisinya dengan di perkotaan. Terbatasnya daya dukung lingkungan di perkotaan memicu munculnya kawasan kumuh yang merusak keindahan, ketertiban, mengganggu kesehatan serta rawan terjadi bencana banjir dan kebakaran.

Sejalan dengan hal itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menetapkan bahwa bentuk-bentuk upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kemiskinan tersebut mencakup penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, perumahan dan permukiman, penyediaan akses pelatihan, modal usaha, serta pemasaran hasil usaha.

Begitu juga UU No.13 Tahun

2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memuat secara rinci bentuk penanganan fakir miskin yaitu pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, serta bantuan hukum dan/atau pelayanan social.

Dengan dilaksanakannya berbagai program tersebut, sasaran yang hendak dicapai pada 2014 adalah Indonesia menjadi kekuatan 16 ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita penduduk di atas 5.000 dolar AS serta produk domestik bruto (PDB) di atas satu triliun dolar AS. Lalu pada 2025 diharapkan pendapatan rata-rata penduduk per kapita Indonesia meningkat menjadi 16.000 dolar AS dengan PDB di atas empat triliun dolar AS. Dengan begitu, ini akan menempatkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 12 di dunia.

Untuk menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar itu, pemerintah membuat strategi dengan berpegang pada tiga pilar yaitu berpihak pada lapangan kerja, berpihak pada kemiskinan, dan berpihak pada lingkungan. Dengan pilar inilah, kemudian dibangun enam koridor ekonomi Indonesia.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa, menyebutkan, sampai 2014 nilai investasi yang akan ditanamkan di dalam koridor itu mencapai Rp.4.000 triliun. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti, BUMN sebesar Rp.900 triliun, APBN Rp.600-an triliun, swasta 150 miliar dolar AS, dan asing 150 miliar dolar AS. Setelah satu tahun berjalan, kini investasinya telah mencapai Rp. 590 triliun. ■ **Ratih Caroko**



Rumah murah



Penanggulangan Kemiskinan Melalui Klaster 4

Pada 2012 ini dalam upaya mensejahterakan masyarakat, pemerintah akan mencoba pendekatan klaster 4 untuk menekan angka kemiskinan.

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 "Percepatan dan Perluasan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat" sebagai upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan maka pada tahun 2012 pemerintah akan memperluas sasaran maupun cakupan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ada dua jalur yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui mekanisme ekonomi, pemerintah mendorong agar ekonomi dapat tumbuh, dengan demikian lapangan kerja tercipta. Angkatan kerja pun dapat terserap, mereka yang bekerja tentunya akan mendapatkan penghasilan kesejahteraan meningkat, sehingga kemiskinannya berkurang. Jalur yang kedua adalah melalui fasilitasi

dan bantuan pemerintah.

Sebelum ini pemerintah sudah meluncurkan tiga klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu klaster pertama bantuan langsung masyarakat (BLM), PNPB Mandiri (klaster dua) dan kredit usaha rakyat atau KUR (klaster 3). Pada 2012 ini pemerintah meluncurkan program pro-rakyat klaster 4. Intinya keempat klaster ini akan dijalankan pemerintah sebagai bentuk upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam klaster 4 ini diupayakan rakyat membeli "sesuatu" dengan harga sangat murah, dan sebagian dibantu pemerintah. Contohnya: pembelian rumah murah dan sangat murah, pembelian angkutan umum murah dan pemberian sistem kredit sangat lunak.

Untuk meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan yang afirmatif (ada keberpihakan) untuk penanggulangan kemiskinan,

pada tahun 2012 akan dilakukan peningkatan dan perluasan program-program yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan termarjinalkan.

Program-program ini ditujukan untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan. Dalam program pro rakyat klaster 4 ini ada enam program baru yang digulirkan pemerintah. Keenam program tersebut adalah program rumah sangat murah, program kendaraan angkutan umum murah, program air bersih untuk rakyat, program listrik murah & hemat, program peningkatan kehidupan nelayan dan program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan.

Pada program pembangunan rumah murah dan sangat murah bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, yang ditujukan untuk menyediakan rumah sangat



Angkutan perdesaan

murah melalui PNPM Mandiri, akan disiapkan perumahan dan permukiman sebanyak 50.000 unit dan rumah murah sebanyak 100.000 unit. Penyediaan rumah murah dan sangat murah ini dilakukan sejauh mungkin berbasis masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat

dan dilaksanakan melalui lembaga keswadayaan masyarakat serta ditujukan untuk masyarakat nelayan dan masyarakat miskin perkotaan yang termarjinalkan.

Harga rumah murah ini diusahakan untuk dapat terjangkau dengan target sasaran, yakni sekitar dibawah Rp.30 juta per

unit. Program pengadaan murah ini juga ditunjang oleh skema kredit lunak. Sumber dana untuk program rumah murah ini, selain dari pemerintah juga diharapkan datang dari kalangan BUMN dan swasta. Untuk sementara bisa saja konsep rumah murah itu berbentuk rumah singgah. Kelompok sasaran dari program ini adalah petani penggarap, nelayan dan buruh kelas bawah.

Program kendaraan angkutan umum murah, sebenarnya ditujukan daerah pedesaan atau kecamatan. Tujuan dari program ini adalah tersedianya kendaraan angkutan umum yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di pedesaan, sektor pertanian, dan UKM. Angkutan umum ini dirancang dapat membawa penumpang dan barang-barang komoditas pertanian. Bahan bakar yang digunakan untuk angkutan murah ini menggunakan listrik, diesel atau gas. Agar harga mobil ini terjangkau oleh pengusaha angkutan di daerah, pemerintah tengah menyiapkan skema kreditnya. Munculnya mobil-mobil hasil karya anak negeri (siswa SMK) dapat dijadikan alternatif pengadaan angkutan murah pedesaan ini.

Dalam penyediaan air bersih untuk rakyat, pemerintah mengupayakan agar akses penduduk di daerah tertinggal dan pesisir untuk air bersih semakin meningkat. Targetnya pada 2025 nanti sudah tidak terjadi lagi krisis air bersih di daerah. Air bersih masih menjadi 'barang mewah' bagi sebagian warga. Wakil Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lukita Dinarsyah Tuwo, mengatakan sebanyak 60 juta penduduk Indonesia saat ini tidak memiliki akses terhadap air bersih. "Padahal, target MDGs

untuk akses air minum layak yang harus dicapai sebesar 21,16 persen. Itu berarti masih ada 60 juta jiwa yang harus dipercepat penanganannya," katanya.

Hingga akhir tahun 2009, secara nasional cakupan pelayanan terhadap sumber air minum layak hanya 47,71 persen. Sedangkan fasilitas sanitasi dasar layak hanya mencapai 51,19 persen.

Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan mengingat target sasaran MDGs di sektor air minum dan sanitasi adalah mengurangi hingga separuh jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2015. "Artinya, sebesar 68,87 persen penduduk Indonesia harus memiliki akses terhadap sumber air minum layak dan sebesar 62,41 persen penduduk memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar yang layak pada 2015," katanya.

Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau bagi masyarakat miskin dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi desa, meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, dan meningkatnya penghematan pemanfaatan tenaga listrik. Penyediaan listrik murah ini dilakukan dari sisi penyediaan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik, serta meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik. Adapun dari sisi pemanfaatan dilakukan dengan menggalakkan pemakaian meteran listrik pra-bayar dan labelling peralatan listrik yang hemat energi.

Penyediaan listrik murah ini bertujuan mengurangi secara signifikan penggunaan BBM sebagai sumberdaya listrik.



Listrik tenaga air

Program Listrik murah ini juga berdampak positif bagi pengurangan subsidi. Dalam program ini termasuk juga program (*mass production*) pengadaan "bohlam hemat-murah, untuk rumah tangga. Perluasan energi surya, melalui teknologi terkini yg relatif murah.

Sementara itu program

peningkatan kehidupan nelayan diarahkan pada daerah di sekitar 400 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Ada beberapa kegiatan yang dilakukan melalui program ini. Di antaranya kegiatan pembangunan rumah sangat murah dengan pemberian sertifikasi tanah nelayan dan pembangunan rumah ramah bencana di lokasi

Pemberdayaan BLK dan SMK untuk peningkatan Kapasitas Pelatihan



Permukiman nelayan

rawan bencana. Menciptakan pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan berupa pengembangan usaha perikanan dan pengembangan alternatif mata pencaharian pada kelompok budidaya perikanan, penyediaan peralatan pengolahan, perlindungan nelayan dan konversi BBM ke gas. Mengembangkan skema UMK dan KUR melalui pembinaan konsultan keuangan mitra bank (KKMB).

Selain itu juga membangun SPBU solar melalui pembangunan SPDN. Membangun *cold storage*, pembangunan pabrik es, pengembangan sarana sistem rantai pendingin.

Mengembangkan angkutan umum murah melalui penyediaan sarana pemasaran bergerak. Fasilitas sekolah dan puskesmas murah dilaksanakan melalui pemberian beasiswa pendidikan untuk anak nelayan; dan fasilitas bank "rakyat" melalui penguatan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) pesisir.

Pemerintah juga meluncurkan

program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan. Kegiatan yang dilakukan pada program ini mencakup pembangunan rumah murah atau upaya realokasi jika kondisi sangat buruk. Kemudian pengembangan ekonomi masyarakat melalui KUR dan UKM juga penyediaan fasilitas khusus sekolah dan puskesmas.

Dari 6 program yang dicantumkan, 4 program pertama, ditargetkan untuk menasar seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM), dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). Sementara itu 2 program lainnya pada Klaster 4, yaitu program 5 dan 6, merupakan suatu program yang dikhususkan untuk menjangkau kelompok masyarakat tertentu yaitu masyarakat nelayan dan masyarakat pinggir perkotaan. Kelompok ini dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan dari berbagai program yang ada pada Klaster 4 dan ketiga klaster lainnya. Kelompok masyarakat pada

program 5 dan 6 pada umumnya masuk pada 60% masyarakat termiskin, yaitu kelompok RTSM dan RTM, serta sebagian kecil dari RTHM.

Selain 6 program dalam Klaster 4, juga terdapat 3 program tambahan, yaitu Program Surplus Beras, Transportasi Jakarta, dan Lapangan Kerja. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Program Lapangan Kerja sangat terkait dengan keempat klaster program pro-rakyat, seperti sumbangan peningkatan kesempatan kerja dari Program PNPB dan KUR.

Secara Makro kebijakan Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat ini saling mendukung dengan kebijakan dalam MP3EI. Program dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 akan terlaksana dengan baik dengan dukungan dari seluruh *stakeholder*, peran aktif masyarakat dan peran serta seluruh elemen bangsa yang secara bersama-sama menyukseskan seluruh Program dan Rencana Kerja Pemerintah.

■ Ratih Caroko

Momentum pertumbuhan industri manufaktur besar yang menyerap banyak tenaga kerja seperti garmen dan alas kaki yang mengarah ke Indonesia harus dimanfaatkan. Tentu saja pertumbuhan ini diiringi kebutuhan tenaga kerja yang terampil demi memenuhi kebutuhan angka produksi yang juga meningkat. Maka mutlak dibutuhkan sebuah peningkatan kapasitas pelatihan untuk para pekerja di industri garmen dan sepatu.

Demi memanfaatkan peluang dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh industri garmen dan alas kaki, para *stakeholder* di bidang ini berkumpul untuk membicarakan bagaimana mensinergikan langkah dalam upaya meningkatkan kapasitas pelatihan bagi para pekerja.

Rapat yang dihadiri oleh Bambang Widianto selaku Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Eksekutif TNP2K, perwakilan Asosiasi Persepatuan Indonesia sebagai pelaku industri, perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengakomodir tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu sumber tenaga kerja terlatih dan

kemungkinan dipakainya SMK sebagai tempat pelatihan bagi pekerja. Perwakilan Kementerian Perindustrian serta perwakilan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pelaksana pelatihan dan penanggung jawab Balai Latihan Kerja (BLK).

Peningkatan pertumbuhan industri garmen dan sepatu saat ini harus disyukuri karena bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Namun tidak hanya bersyukur, pemerintah juga wajib mempersiapkan tenaga kerja yang terampil sehingga tuntutan peningkatan kapasitas produksi bisa terpenuhi dengan baik.

Kondisi saat ini Aprisindo mengalami kesulitan dalam memenuhi ketersediaan tenaga kerja terampil. Selain karena tren bajak membajak pekerja di

kalangan industri sepatu, juga minimnya pelatihan bagi para pekerja khususnya pada bidang-bidang tertentu seperti desain dan mekanik. Sayangnya banyak BLK di daerah kurang optimal, sementara suplai dari lulusan SMK juga masih sangat minim.

Untuk itu baik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Perindustrian dan pelaku industri saling berkomitmen untuk terus bersinergis dan melakukan peningkatan pelatihan baik melalui BLK, SMK atau lembaga pelatihan swasta demi terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja terampil di industri garmen dan sepatu. Dengan begitu program pengentasan kemiskinan melalui lapangan pekerjaan bisa berjalan dengan baik. ■



TMP/28-05/2012



TMP/28-05/2012

Kunjungan Wapres Boediono ke Kelurahan Gundih, Surabaya

Kampung Bersih Dari Pinggir Rel Gundih

Tidak ada yang tak mungkin. Dengan usaha dan program yang jelas, kawasan "merah" yang kerap dianggap momok kini jadi daerah percontohan kampung yang bersih.

Wapres Boediono terlihat begitu terkesan dengan kesuksesan masyarakat pinggiran rel di Kampung Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Kampung yang dulunya kumuh, gersang dan dikenal rawan hingga dikenal

dengan sebutan "kawasan merah", yang artinya kampung preman dari segala kejahatan di Surabaya, sekarang sudah berbalik 180 derajat. Kini Kampung Gundih telah beralih status menjadi "Kampung Wisata Lingkungan" yang menawarkan lingkungan asri, bersih

dan bebas asap rokok.

Bersama Menteri Lingkungan Hidup Balthazar Kambuaya, Menteri Pendidikan Mohammad Nuh dan Gubernur Jatim Soekarwo, Wapres Boediono melakukan peninjauan ke lokasi Bank Sampah, Komposter Sampah, dan juga pengelolaan Limbah Rumah Tangga yang semua ini dilakukan atas dasar inisiatif dan swadaya masyarakat sendiri dalam mengelola dan memanfaatkan sampah dan limbah rumah tangga.

Beliau juga sangat antusias mendengarkan secara seksama ketika Walikota Surabaya Ibu Tri Rismaharini mengungkapkan bagaimana warga setempat berinisiatif mengolah sampah liar berkerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM.

Walikota Rismaharini juga menjelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh warga. Mulai dari memilah sampah organik dan anorganik, memanfaatkan sampah organik sebagai kompos melalui mekanisme komposter, mengelola sampah an-organik menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi, sampai pada pengelolaan limbah air rumah tangga yang bisa dimanfaatkan warga sekitar digunakan untuk kegiatan sehari-hari non konsumsi.

Instalasi alat pengolahan air

limbah (APAL) sebagai pengolahan air limbah komunal membuat air limbah rumah tangga yang biasanya langsung dibuang ke saluran pembuangan menjadi lebih bermanfaat. Dengan APAL, air buangan dari beberapa rumah tangga diolah dengan teknologi penjernihan yang tidak terlalu rumit. Berikutnya air hasil olahan disimpan di dalam bak penampung untuk dapat digunakan oleh warga kembali melalui kran-kran bersama yang terdapat dipinggir-pinggir jalan sehingga dapat digunakan langsung oleh warga masyarakat.

Dengan tingkat kejernihan yang dihasilkan, saat ini air hasil olahan APAL baru dapat digunakan untuk keperluan menyiram tanaman dan mencuci sepeda motor. Dalam perkembangannya, inisiatif masyarakat dalam pembangunan APAL ini mendapat dukungan PNPB Perkotaan, yang

melakukan penyempurnaan teknologi dan penambahan jumlah instalasinya.

Sampah yang menghasilkan

Khusus untuk pengelolaan sampah, warga Gundih justru mendapatkan penghasilan tambahan lewat sampah yang ada di lingkungan mereka. Pemilahan sampah dilakukan mulai dari rumah tangga, khususnya sampah organik dan anorganik. Sampah organik yang telah dipisahkan diolah secara sederhana menjadi kompos dengan menggunakan alat pembuatan kompos (komposter) skala komunal. Alat ini biasanya diletakkan di depan rumah salah satu warga dan digunakan bersama-sama oleh beberapa warga di dalam satu lingkungan, biasanya per sepuluh rumah (kelompok *dasawisma*).

Kompos yang dihasilkan digunakan untuk keperluan



TMP/UCU SINAR

sendiri seperti mengganti media tanam (tanah) tanaman-tanaman milik warga. Komposter dibuat dari barang-barang bekas pakai sederhana yang dapat dibeli oleh warga di pusat penjualan barang bekas dan besi tua sepanjang

Jalan Dupak dan Jalan Demak. Pelaksanaan PNPM Perkotaan belakangan juga mendukung inisiatif masyarakat ini, dengan melakukan penambahan jumlah komposter secara komunal.

Selain kompos, warga juga

memanfaatkan sampah dengan menjadikannya sebagai produk *recycle*. Usaha daur ulang sampah plastik ini merupakan langkah lanjutan dari kegiatan pemilahan sampah rumah tangga. Berbagai jenis sampah plastik, seperti bekas bungkus deterjen dan pewangi pakaian dipisahkan, dibersihkan, dibentuk dan digunakan kembali menjadi barang kerajinan dan *souvenir* menarik seperti tas belanja, dompet, dan payung. Hasil kerajinan yang menjadi bagian kaum ibu ini sudah dipamerkan di beberapa even eksibisi dagang di tingkat kota, provinsi, maupun tingkat nasional dan mendapatkan animo yang cukup besar dari masyarakat.

Sementara langkah pemanfaatan sampah lainnya adalah melalui bank sampah. Bank yang khusus melayani sampah ini didirikan oleh warga sebagai upaya pengelolaan sampah anorganik khususnya yang masih mempunyai nilai ekonomis. Tak jauh berbeda dengan praktek perbankan konvensional, bank sampah juga melayani transaksi keuangan. Lewat bank sampah, warga menyetorkan tabungannya berupa sampah jenis tertentu yang masih memiliki nilai ekonomi. Oleh bank sampah kemudian sampah tabungan warga ini dijual kepada pengepul atau langsung kepada pihak usaha yang membutuhkan jenis sampah tersebut. Hasil dari penjualan inilah yang kemudian dicatat sebagai tabungan warga dan berhak digunakan oleh mereka sesuai dengan nilai sampah yang disetorkan.

Satu Jiwa Satu Pohon

Tak hanya bersih dari sampah, lingkungan Gundiuh juga tampak asri dan hijau menyegarkan mata. Deretan pohon mulai dari perdu hingga pohon dalam pot berjejer



TMP/UCU SINAR

rapi di sepanjang lorong yang ada di wilayah Gundiuh. Untuk yang satu ini sebenarnya bukan hal baru bagi Gundiuh, karena penanaman pohon di lingkungan Kelurahan Gundiuh telah dilakukan secara swadaya sejak tahun 1990-an. Inisiatif ini semakin berkembang sejalan dengan program Pemerintah Kota Surabaya yang menerapkan kebijakan "satu jiwa, satu pohon" dimana setiap penambahan penduduk baik karena kelahiran maupun karena perpindahan harus diiringi dengan penanaman satu pohon di kelurahan setempat.

Selain itu, dengan diadakannya *Lomba Surabaya Green and Clean* sejak Tahun 2005, partisipasi dan semangat warga untuk menanam pohon dan memperindah lingkungan tempat tinggal makin meningkat.

Khusus kawasan pinggir rel yang kerap dianggap sebagai daerah yang kumuh, miskin dan

rawan kejahatan, Kelurahan Gudih punya resep tersendiri untuk menanganinya. Kawasan yang identik dengan tempat berkumpulnya gelandangan dengan rumah semi permanennya, disulap menjadi kawasan yang cantik dan nyaman. Dalam program penataan kawasan di sepanjang rel kereta api, masyarakat menjalankan langkah dua tahap.

Yang pertama dilakukan adalah mendata dan meminta warga-warga pendatang yang tinggal di rumah-rumah semi permanen (gubuk-gubuk) di pinggir rel untuk pindah tinggal di wilayah kampung dengan cara menyewa rumah penduduk setempat. Tentu saja hal ini bukanlah hal yang mudah, tentu penolakan datang dari masyarakat penghuni gubuk liar. Namun masyarakat Gundiuh tak pendek akal. Para penghuni gubuk liar itu dijanjikan harga sewa yang murah serta pekerjaan

tetap dengan penghasilan yang lumayan.

Seperti yang disampaikan oleh Sugiharto, Ketua RW 10 Margorukun. "Tahap ini merupakan proses yang membutuhkan waktu paling lama, karena upaya untuk membujuk penghuni untuk pindah tidaklah mudah" papar Sugiharto. Kemudian "Beberapa langkah yang ditempuh agar para penghuni gubuk-gubuk liar tersebut mau pindah adalah dengan memberi mereka harga sewa rumah yang lebih murah. Selain itu cara yang ditempuh adalah memberi pekerjaan agar bisa membayar sewa rumah. Misalnya dengan diminta membantu mengoperasikan gerobak jualan bakso atau soto milik warga setempat," tambah Sugiharto.

Kemudian langkah yang kedua adalah penataan wilayah di sekitar rel kereta api. Warga Gundiuh membangun beberapa sarana



TNP2K - SUKSES

sosial yang memungkinkan, misalnya dibangun beberapa taman kecil tempat berkumpulnya warga, tempat bermain anak yang dilengkapi dengan pagar pembatas, serta beberapa sarana pengolahan sampah.

1000 Kampung Bersih

Atas usaha yang telah dilakukan, Kelurahan Gundih kerap mendapatkan penghargaan atas usaha warganya melakukan penghijauan.

Seperti Kampung Best of the Best, dalam lomba cipta kampung aman pada tahun 2010, penghargaan Kampung Hijau dan Mandiri juga di tahun 2010. Sebelumnya tahun 2009, Gundih juga menerima penghargaan Kampung Berbunga. Koordinasi antar masyarakat secara swadaya merupakan kunci dari keberhasilan ini.

Menurut Rismaharini saat ini sudah ada sekitar 1000 lebih kampung atau setingkat RW di Surabaya yang mampu

mengelola sampahnya sendiri secara swadaya, mereka saling berkoordinasi dan memantau kegiatan antar mereka sendiri, sedangkan peran pemerintah kota dalam hal ini adalah memfasilitasi dengan menggandeng LSM, lalu mereka mencari tokoh masyarakat yang potensial untuk dijadikan fasilitator atau motor penggerak sebagai kader lingkungan di kampung mereka masing-masing.

Menurut data, saat ini Pemerintah Kota Surabaya memiliki 420 tokoh masyarakat yang menjadi fasilitator lingkungan. Para fasilitator itu bekerja dengan 28 ribu kader lingkungan di seluruh Surabaya. Untuk memancing daerah lain untuk melakukan hal yang sama, pemerintah kota pun menggandeng media massa dalam mempublikasi kampung-kampung bersih dan mengadakan dua kali penghargaan kebersihan setiap tahunnya: Surabaya Green and Clean dan Merdeka dari Sampah

yang dibiayai oleh kalangan swasta dan perusahaan-perusahaan negara yang berlokasi di Surabaya. Tak heran jika buah keseriusan ini beberapa kelurahan mendapatkan penghargaan, bahkan hingga tingkat internasional. Seperti Kelurahan Jambangan RW 1 yang mendapat penghargaan pengelolaan air sedunia di Wina, Austria.

Wajar jika kemudian apa yang dilakukan oleh masyarakat Gundih ini mendapat apresiasi dari Wapres Boediono. Buat wapres program-program yang dijalankan ini memberikan manfaat baik secara ekonomi dan sosial.

Pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri oleh warga mampu menghasilkan pupuk kompos dan biogas melalui mekanisme yang *sustainable* dan berkala karena dilakukan melalui kesepakatan bersama warga dalam pembagian tugasnya untuk menjalankan sistem tersebut.

Dalam pernyataannya wapres berharap adanya kerjasama antar warga, pemerintah daerah, serta LSM dalam melaksanakan program kampung bersih ini. Dan usaha Kampung Margorukun, Gundih ini patut dijadikan contoh untuk direplikasikan oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Para kepala daerah yang mempunyai persoalan dengan pembenahan kawasan kumuh bisa juga langsung meninjau dan mempelajari apa yang dilakukan warga Kampung Gundih.

"Saya kira daerah lain yang mempunyai permasalahan dengan kawasan kumuh bisa mengadopsi sebagian atau seluruhnya apa yang dilakukan warga di Surabaya," ujar Boediono pada media. Warga Gundih boleh membusungkan dada atas apa yang telah mereka hasilkan, yang pasti kita patut belajar dari kesuksesan mereka. ■

Serius Menanggulangi Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia tak perlu diragukan lagi. Pemerintah telah bekerja keras melakukan itu, misalnya dengan cara melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program pro rakyat 4 klaster. Harapannya agar angka kemiskinan bisa turun pada level 8-10 persen di tahun 2014.

Keseriusan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tercermin dengan selalu dibahasnya isu tersebut dalam setiap rapat koordinasi tingkat menteri. Seperti yang dilakukan pada rakor tingkat menteri di awal tahun 2012 kemarin (5/1). Rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Kesra Agung Laksono membahas tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Berbagai agenda penting tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan dibahas dalam rapat tersebut, di antaranya mengevaluasi pelaksanaan program pro-rakyat melalui 4 klaster dan melaksanakan percepatan program 4 klaster tersebut untuk menghadapi dampak krisis ekonomi. Selain itu rakor juga membahas tentang pelaksanaan aksi nasional penanggulangan kemiskinan (RAN-PK) 2012-

2014. Berbeda dengan rakor tingkat menteri lainnya, rakor yang diadakan di Kementerian Sosial pada awal Januari itu dibagi menjadi 2 ruang pembahasan. Ruang pertama membahas tentang pelaksanaan Klaster 1 dan 2, dipimpin langsung oleh Menko Kesra Agung Laksono. Sedangkan ruang kedua membahas tentang pelaksanaan Klaster 3 dan 4 yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa. Masing-masing ruang dihadiri oleh menteri terkait.

Dari hasil rakor tingkat menteri tersebut kemudian disepakati poin-poin yang akan dilaporkan kepada presiden dan wakil presiden selaku ketua TNP2K yakni:

1. Hasil pendataan BPS melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 akan digunakan sebagai data dasar perencanaan dan



Pendataan warga miskin

pelaksanaan seluruh program penanggulangan kemiskinan.

2. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Kemiskinan yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan mengacu dokumen MP3EI perlu dievaluasi bersama dengan melibatkan Kementerian/Lembaga pelaksanaan program, sehingga penurunan jumlah



Rumah warga miskin

penduduk miskin sebesar 8-10% di tahun 2014 dapat tercapai.

3. Perlu pengoptimalan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui sinkronisasi dan sinergi 4 (empat) klaster/kelompok program penanggulangan kemiskinan.
4. Perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok *near poor* karena sangat rentan untuk jatuh lagi ke dalam kelompok miskin dan sangat miskin apabila terjadi krisis dan gejolak ekonomi, serta peningkatan peran kelompok perempuan dalam seluruh program penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini perlu dipastikan agar kelompok *near poor* dan perempuan masuk dan berpartisipasi aktif dalam skema program PNP Mandiri.
5. Pengoptimalan mekanisme

channeling antara kelompok-kelompok masyarakat binaan program penanggulangan kemiskinan, terutama PNP Mandiri, dengan pendanaan di luar APBN dan APBD untuk menjamin keberlanjutan.

6. Perlu pengoptimalan peran pemerintah daerah melalui penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mensinkronkan dan mensinergikan seluruh program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah.
7. Diperlukan pendekatan dan model khusus untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Papua dan Papua Barat mengingat kondisi sosial dan geografis

yang kurang mendukung.

8. Diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh peraturan terkait dengan program penanggulangan kemiskinan seperti Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Direktur Jenderal, dan Pedoman Umum sehingga pelaksanaan program lebih efektif dan implementatif di daerah.
9. Sebagai tindak lanjut dari Rakor, akan dilaksanakan pertemuan rutin antar menteri anggota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) minimal 1 bulan sekali untuk mengawal pencapaian target-target yang sudah ditentukan di dalam dokumen RPJMN 2010-2014 dan mengantisipasi kemungkinan dampak negatif dari krisis ekonomi dunia tahun 2012.

Rapat Paripurna Kabinet

Sebagai tindak lanjut dari pembahasan dalam rakor tingkat menteri tersebut, di bulan yang sama tepatnya tanggal 18 Januari 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono menggelar rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden. Dengan agenda utamanya menyangkut bidang perekonomian.

Ada tiga hal dibahas secara bersama dalam kesempatan itu. Pertama, progres dan implementasi dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kedua, terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas, dan yang Ketiga implementasi empat klaster program prorakyat.

Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, presiden menekankan sekaligus mengajak untuk meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan. Dua hal yang menyebabkan hal ini dirasa penting adalah angka kemiskinan di Indonesia masih di atas 10 persen dan gejolak ekonomi dunia yang mempengaruhi inflasi.

Seperti dikutip dari *presidensby.info* bahwa presiden memandang 4 klaster program prorakyat ini sangat penting untuk memastikan bahwa ekonomi Indonesia bukan hanya tumbuh tetapi juga bisa secara bertahap mengurangi kemiskinan.

"Program ini perlu dijaga efektivitasnya dan harus senantiasa dievaluasi. Kalau memang ada yang tidak efektif, ya diperbaiki, dibikin lebih efektif lagi, karena ini program kita sendiri, kebijakan kita sendiri. Kalau kita rasa harus ada perbaikan dan perubahan, ya kita lakukan," jelas Presiden SBY.

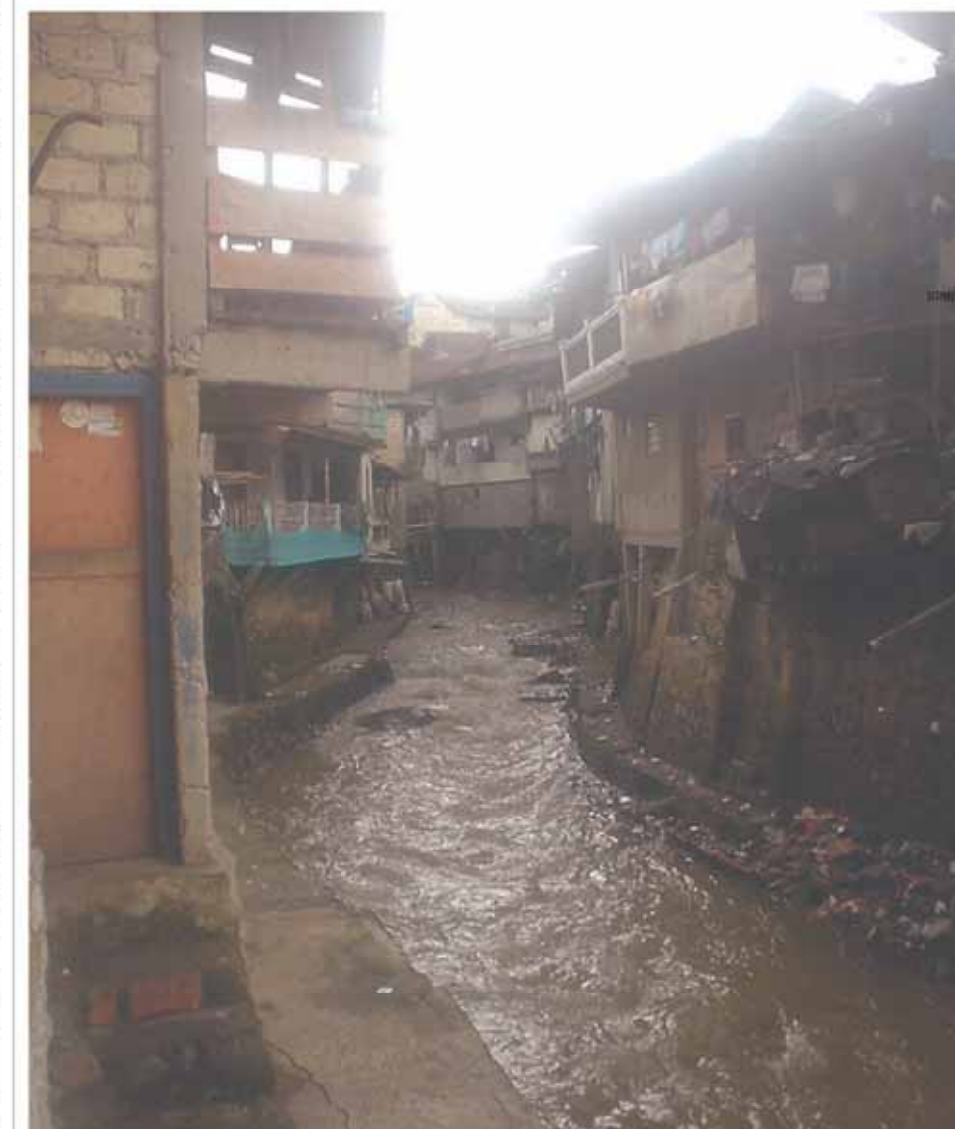
Tiga hal yang dibahas dalam rapat ini menjadi sangat penting dikarenakan perekonomian

dunia sekarang ini sedang tidak menentu, dimana setiap saat krisis bisa terjadi yang hampir pasti langsung maupun tidak berdampak pada perekonomian bangsa-bangsa di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Sementara itu, gejolak moneter dunia menimbulkan krisis harga, inflasi, dengan fokus utama di sektor pangan dan energi. "Kenaikan harga pangan dan energi mengganggu, menghambat, menghalangi program pengentasan kemiskinan. Hal ini juga kita

saksikan di negara maju, gejala perekonomian itu menciptakan pengangguran baru," ujar Kepala Negara.

"Kalau itu terjadi di negara berkembang, ada inflasi pangan dan energi, ada pengangguran baru, hampir pasti kemiskinan akan meningkat. Atas dua hal itulah bagaimanapun kita harus melakukan percepatan dan perluasan ekonomi. Intinya, investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Pararel dengan itu kita juga harus melakukan hal yang



Permukiman di bantaran sungai

sama untuk penanggulangan kemiskinan," tambah presiden.

Presiden juga menjelaskan, bagi Indonesia tidak hanya jaminan sosial saat terjadi krisis, tetapi juga adanya kebijakan yang berkelanjutan. "Ada atau tidak ada krisis, kita harus betul-betul meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan ini," tandasnya.

Rapat Kerja Pemerintah 2012

Usai rapat paripurna kabinet, keesokan hari, tepatnya tanggal 19 Januari 2012 pemerintah juga menggelar Rapat Kerja Pemerintah 2012 di Jakarta International Expo, Kemayoran. Rapat yang bertajuk "Tahun Peningkatan Kerja dan Prestasi" itu dibuka oleh Wakil Presiden Boediono. Rapat diikuti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, para kepala lembaga tinggi negara, para gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia.

Dalam rapat itu dibahas berbagai persoalan bangsa, menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan, antisipasi dampak krisis ekonomi global, lapangan kerja, juga stabilitas sosial ekonomi dan politik.

Dalam pembukaannya Wapres menjelaskan Indonesia beruntung berhasil melewati badai krisis finansial global sepanjang 2011 dengan prestasi yang baik. Namun ia mengingatkan bahwa badai krisis masih bisa mengancam pada 2012. Oleh karenanya ia meminta agar para pemimpin daerah rajin memantau situasi antara lain kestabilan stok pangan dan menyiapkan antisipasi bila terjadi guncangan stabilitas ekonomi di masyarakat.

Menyinggung masalah penanggulangan kemiskinan, seperti

dikutip dari *wapres.go.id*, Wapres meminta agar aparat pemerintah daerah bergabung dalam jaringan kerja penanggulangan kemiskinan yang sudah dibentuk mulai dari tingkat pemerintah nasional hingga provinsi dan segera dibentuk di setiap kabupaten/kota. Dikatakan juga bahwa sebuah bank data masif sudah selesai menyangkut program penanggulangan kemiskinan nasional.

"Pada 2011 sudah diselesaikan database kemiskinan sehingga bisa dijadikan sebagai penentuan sasaran bagi program kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut," ungkap Wapres.

"Berikan atensi khusus pada komunitas rawan, misalnya nelayan, petani penggarap, masyarakat pinggir perkotaan dan sebagainya. Program empat klaster mari kita sukseskan dan saya senang daerah memperkuatnya dengan program daerah," ujar SBY.

Bank data itu mencakup nama dan alamat dari mereka yang termiskin, miskin, kurang miskin, yang pada intinya mencapai 40 persen terbawah populasi Indonesia dalam strata sosial. "Data ini bisa digunakan bersama baik di pusat maupun di daerah untuk mewujudkan program-program pengentasan kemiskinan, menganalisa intervensi apa yang bisa dilakukan untuk memindahkan mereka yang berada di bawah garis menjadi di atas garis, dan menghindari duplikasi pemberian subsidi," kata

Wapres.

Sedangkan Presiden SBY dalam arahannya pada raker tersebut menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas di semua program pemerintah. Untuk tahun 2012, pemerintah menargetkan angka kemiskinan berkisar antara 10,5 hingga 11,5 persen.

Untuk mengurangi kemiskinan ini, kata Presiden seperti dikutip dari *presidensby.info*, pemerintah menempuh dua jalur, yakni mekanisme ekonomi dan program prorakyat.

"Berikan atensi khusus pada komunitas rawan, misalnya nelayan, petani penggarap, masyarakat pinggir perkotaan dan sebagainya. Program empat klaster mari kita sukseskan dan saya senang daerah memperkuatnya dengan program daerah," ujar SBY.

Pemerintah sendiri sedang menyusun cetak biru untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Kalau dalam pembangunan ekonomi kita mengenal Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), maka untuk pengurangan kemiskinan ini pemerintah akan meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). "(MP3KI ini) bisa kita ukur anggarannya, sasarannya jelas, hasilnya bisa kita ukur bersama," kata SBY menjelaskan.

Penekanan terhadap ideologi mengurangi kemiskinan ini merupakan salah satu dari direktif Presiden. Lainnya, Presiden menginstruksikan jajaran pemerintah untuk melaksanakan program kerja pemerintah, baik itu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKP2012 maupun APBN dan APBD 2012, sepenuhnya.

■ *lw/db*

Basis Data Terpadu, Terobosan Besar Identifikasi Penduduk Miskin



Badan Pusat Statistik telah menyerahkan hasil akhir Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Selanjutnya data tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam memberikan bantuan bagi masyarakat sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan.

Berempat di Istana Wakil Presiden, Jumat pagi (20/1/2012), telah dilakukan penyerahan laporan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai hasil akhir Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) antara pelaksana tugas Kepala BPS Suryamin kepada Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto.

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) merupakan pendataan yang dilakukan BPS selama 6 bulan, sejak Juli 2011 hingga Desember 2011 hingga menghasilkan BDT (Basis Data Terpadu). Proses pendataan itu telah melibatkan 120.000 petugas

pencacah di lapangan. Data yang dihimpun sekitar 96,7 juta jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 25,2 juta rumah tangga miskin yang menjadi target program perlindungan sosial.

Basis Data Terpadu yang merupakan hasil akhir dari PPLS itu dirasakan cukup lengkap karena telah berisi tentang identifikasi rumah tangga sangat miskin yang memiliki anak usia balita atau memiliki anak usia SD/SMP untuk calon peserta Program Keluarga Harapan, identifikasi individu sampai tingkat kesejahteraan



PROGRES-HAMKA

tertentu untuk Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, identifikasi perempuan usia subur per daerah untuk efektivitas program bantuan kontrasepsi, sampai dengan identifikasi anak usia sekolah yang bekerja untuk program pengurangan pekerja anak. Sehingga diharapkan Basis Data Terpadu itu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial lebih akurat.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Boediono berharap agar data ini dapat digunakan secara optimal. BDT dapat mendukung berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah penyelenggara program dapat berkonsentrasi pada perbaikan kualitas program karena sa-

“TNP2K yang mengatur penggunaan data dengan kementerian dan lembaga untuk keperluan kemanusiaan dan program pemerintah. Bukan untuk marketing.”

sarannya sudah jelas.

Namun Wapres berpesan jangan sampai ada penyalahgunaan data ini. “TNP2K yang mengatur penggunaan data dengan kementerian dan lembaga untuk keperluan kemanusiaan dan program pemerintah. Bukan untuk *marketing*,” kata Wapres.

Wapres juga menilai bahwa dengan tersedianya data ini merupakan sebuah terobosan besar dalam mengidentifikasi penduduk miskin secara lebih

akurat. TNP2K akan mampu mengidentifikasi penduduk miskin yang menjadi target penanggulangan kemiskinan secara lebih tajam. Penentuan sasaran yang lebih tajam sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan efektifitasnya secara signifikan.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto dalam sambutannya mengatakan bahwa TNP2K membuka akses seluas-luasnya pada pemanfaatan Basis Data Terpadu ini. Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dapat menghubungi Sekretariat TNP2K untuk mendapatkan data ini. Sekretariat TNP2K akan menyediakan daftar nama dan alamat individu, keluarga, atau rumah tangga sasaran program. Sekretariat TNP2K tidak memungut biaya untuk penyediaan data tersebut.

Penyempurnaan atas kriteria kemiskinan

Pendataan PPLS 2011 menginternalisasi sejumlah penyempurnaan atas kriteria kemiskinan yang digunakan dalam pencacahan sebelumnya. Sekretariat TNP2K dan BPS juga mengembangkan seperangkat metodologi pendataan berdasarkan standar internasional yang sah, yang meliputi:

- Pemanfaatan data Sensus Penduduk 2010 dalam menyusun referensi awal daftar rumah tangga yang akan dicacah.
- Konsultasi dengan kelompok penduduk miskin di daerah pendataan, untuk menangkap persepsi rumah tangga miskin dan mengurangi dampak dari bias kelompok elit.
- Penyisiran lapangan oleh pencacah memastikan pendataan kepada seluruh kelompok miskin dan rentan.
- Validasi dan verifikasi di akhir periode pengumpulan data, melalui kunjungan langsung ke rumah tangga oleh pengawas petugas pencacah lapangan.

Selanjutnya, data PPLS 2011 akan digunakan sebagai Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dijalankan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung proses penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, Basis Data Terpadu dibangun untuk dapat memenuhi kebutuhan masing-masing program secara fleksibel. Selain menyediakan nama dan alamat dari 25,2 juta rumah tangga (atau sekitar 96,7 juta jiwa), Basis Data Terpadu juga memiliki informasi yang cukup kaya dan dapat digunakan untuk berbagai

tujuan sesuai kriteria kepesertaan yang spesifik bagi masing-masing program. Misalnya, identifikasi rumah tangga sangat miskin yang memiliki anak usia balita atau memiliki anak usia SD/SMP untuk calon peserta Program Keluarga Harapan, identifikasi individu sampai tingkat kesejahteraan tertentu untuk Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, identifikasi perempuan usia subur per daerah untuk efektivitas program bantuan kontrasepsi, sampai dengan identifikasi anak usia sekolah yang bekerja untuk program pengurangan pekerja anak. Pemanfaatan Basis Data Terpadu diharapkan dapat memperbaiki akurasi sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah penyelenggara program dapat lebih berkonsentrasi kepada perbaikan kualitas dan peningkatan keberhasilan program yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Sekretariat TNP2K akan bekerja sama dengan penyelenggara program untuk penyediaan daftar nama dan alamat sasaran program yang berasal dari Basis Data Terpadu. Sekretariat TNP2K juga akan membantu penyelenggara program untuk memanfaatkan berbagai sumber data lainnya seperti Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Potensi Desa (Podes), dan data lainnya. Seluruhnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Perlindungan Sosial di Indonesia.

Kerjasama erat antara TNP2K dan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah pengguna Basis Data Terpadu merupakan salah satu kunci utama pemanfaatan Basis Data Terpadu ini secara optimal. Pemanfaatan secara opti-

Sekretariat TNP2K juga akan membantu penyelenggara program untuk memanfaatkan berbagai sumber data lainnya seperti Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Potensi Desa (Podes), dan data lainnya. Seluruhnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Perlindungan Sosial di Indonesia.

mal ini meliputi beragam aspek mulai dari penetapan kriteria penetapan sasaran oleh masing-masing program sampai dengan adanya umpan balik dari masing-masing program terkait Basis Data Terpadu. Selain itu, informasi yang tersedia dalam Basis Data Terpadu dapat juga dimanfaatkan sebagai masukan dalam proses desain dan perencanaan program penanggulangan kemiskinan dan program perlindungan sosial yang baru.

TNP2K membuka akses seluas-luasnya kepada pemanfaatan Basis Data Terpadu ini. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah penyelenggara program perlindungan sosial dapat menghubungi Sekretariat TNP2K untuk mendapatkan data ini. Berdasarkan uraian dan deskripsi Program Perlindungan Sosial yang direncanakan, Sekretariat TNP2K akan menyediakan daftar nama dan alamat individu, keluarga, atau rumah tangga sasaran program. Penyediaan Basis Data Terpadu oleh Sekretariat TNP2K dilaksanakan tanpa memungut biaya. ■ *Iw/dbs*

Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011)

Apa Pendataan Program Perlindungan Sosial?

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), pertama kali dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008. Pada saat itu, PPLS bertujuan untuk melakukan pemutakhiran (*updating*) basis data Rumah Tangga Sasaran Bantuan Langsung Tunai (RTS BLT). Data tersebut telah digunakan oleh pemerintah untuk berbagai program perlindungan sosial, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk Orang Miskin (Raskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), dan lain-lain. Tahun 2011 ini, BPS kembali melaksanakan kegiatan PPLS yang dimaksudkan untuk mendapatkan daftar nama dan alamat (*by name by address*) rumah tangga dengan urutan kondisi sosial ekonomi terbawah secara nasional.

Apa Dasar Hukumnya?

Pelaksanaan Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011) didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Apa Tujuannya?

Pelaksanaan PPLS 2011 bertujuan untuk memperoleh basis data terpadu rumah tangga menengah ke bawah di Indonesia, yaitu 40% rumah tangga sesuai urutan kondisi sosial ekonomi terbawah, berdasarkan nama dan alamat.

Bagaimana Tahapan Pendataannya?

Tahapan PPLS 2011 meliputi:

1. Petugas pendataan berdiskusi dengan ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, petugas mendatangi ketua SLS (Kampung/Jorong/Nagari/Dusun/RT) untuk mengkonfirmasi keberadaan rumah tangga yang tercatat dalam daftar.
2. Keterangan rumah tangga berisi: status penguasaan bangunan, luas dan jenis lantai, jenis dinding dan atap, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar untuk memasak, fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, kepemilikan aset, dan kepesertaan dalam program perlindungan sosial.
3. Petugas pendataan melakukan pencacahan secara rinci kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Apa yang Ditanyakan?

Keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga: nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, kecacatan, penyakit menahun, kepemilikan tanda pengenal, kehamilan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas.

Keterangan rumah tangga: status penguasaan bangunan, luas dan jenis lantai, jenis dinding dan atap, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar untuk memasak, fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, kepemilikan aset, dan kepesertaan dalam program perlindungan sosial.

Apa Manfaatnya?

Sebagai data tunggal yang digunakan oleh pemerintah untuk merancang program peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah yang lebih baik.



Kerjasama Penyaluran Dana Bantuan PKH

Tahun 2012 ini pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi sekitar 10,5 hingga 11,5 persen. Untuk itu berbagai upaya dilakukan, di antaranya dengan mempermudah penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM) lewat perbankan.

Sebagai langkah kemudahan dalam penyaluran dana bantuan PKH kepada masyarakat miskin di seluruh Indonesia, Kementerian Sosial telah melakukan kerja sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Penandatanganan kerjasama itu dilakukan pada November lalu (24/11/2011) di Istana Wakil

Presiden oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Andi Z. A. Dulung, yang bertindak atas nama Kementerian Sosial sebagai pihak pertama dengan Direktur Bisnis Kelembagaan Bank BRI Asmawi Syam mewakili Direksi Bank BRI sebagai pihak kedua.

Penandatanganan itu disaksi-

kan langsung oleh Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto.

Dipilihnya BRI sebagai mitra dalam penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin, dikarenakan



bank pemerintah ini memiliki 6.100 outlet BRI yang tersebar diseluruh pelosok daerah di tanah air secara *real time online*. Sehingga diyakini dengan fasilitas tersebut dapat mempermudah penyaluran bantuan ke semua wilayah.

"Secara teknis, kami siap menyalurkan kepada RTSM di seluruh Indonesia. Penyaluran ini disampaikan melalui TabunganKU, tabungan yang tak kena biaya administrasi," jelas Direktur Bisnis BRI Asmawi Syam, dalam kata sambutannya.

Selain itu, BRI juga telah berpengalaman dalam penyaluran BLT. Dan BRI tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik untuk program PKH kali ini. "Kepercayaan kepada PT BRI adalah kebanggaan bagi

kami karena untuk melayani masyarakat miskin ini kami akan terdepan, karena kami punya jaringan sangat luas di negeri ini," tambah Asmawi Syam.

Sementara itu, Dirjen Jaminan Sosial Kemensos Bapak Andi Zainal Abidin Tulung dalam sambutannya mengatakan siap bekerja sama dengan BRI dalam menyalurkan dana bantuan PKH itu. Namun menurutnya, selain penerima bantuan tunai harus memenuhi persyaratan, pihak penyelenggaranyapun harus juga memenuhi persyaratan. Misalnya persyaratan waktu, persyaratan operasional juga persyaratan regulasi.

"Jika ini bisa diwujudkan, tentu akan terwujud rasa aman karena kita melakukan sudah sesuai

aturan yang berlaku," ungkap Andi Zainal.

Dana bantuan PKH sejatinya adalah program bantuan uang untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM) secara bersyarat (*conditional cash transfer*). Program ini sudah ada sejak tahun 2007. Saat itu baru 500.000 RTSM yang mendapatkan bantuan. Tapi kini sudah mencapai sekitar 1,1 juta RTSM. Meski demikian masih ada sekitar 30 juta orang yang berada dibawah garis kemiskinan di seluruh Indonesia yang juga perlu diberikan bantuan. Dan diharapkan pada tahun 2012, pelaksanaan bantuan PKH bisa menjangkau 33 provinsi. Untuk itu penanganannya harus semakin profesional.

"Kita harus terus berbenah

baik di lapangan maupun di pusat, juga dalam kelembagaan. Bapak Mensos berkomitmen demi sukses program ini. Insya Allah kami laksanakan amanah sebaik-baiknya," jelas Andi.

Program Andalan

Dalam sambutannya Bambang Widianto menjelaskan bahwa PKH adalah program andalan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (Klaster I). Program ini didukung oleh 6 kementerian, yaitu Kementerian Sosial sebagai koordinator, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri.

Melalui program PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Karena PKH menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan anak keluarga miskin dan kualitas kesehatan ibu hamil.

Pada 2014 nanti PKH ditargetkan bisa melayani 3 juta keluarga sangat miskin. Untuk mencapai 3 juta RTSM ini tidak mudah, jika ditotal akan melayani hampir 6 juta orang. Diharapkan PKH bisa memutus mata rantai kemiskinan karena bisa menyekolahkan anak-anak dan menjaga kesehatan. Hal itu dikarenakan syarat yang menyertai PKH. Syarat itu harus diverifikasi kepatuhan kepada program, misalnya anak-anak penerima PKH harus sekolah, dengan absensi minimal 80%, kalau balita harus ke puskesmas, kalau ibu hamil harus diperiksa di puskesmas, diharapkan generasi berikutnya akan jauh lebih sehat dan lebih terdidik serta lebih berperilaku baik, berkat PKH.

"Untuk itu proses penyaluran



Usaha kecil yang dilakukan peserta Program Keluarga Harapan.



Pelayanan kesehatan balita di puskesmas.

bantuan tunai kepada para penerima PKH sangat penting", kata Bambang. Selain memakai bantuan PT POS seperti yang selama ini dilakukan, ke depannya penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin akan lebih banyak menggunakan sistem

perbankan.

"Kami harap ini bagian dari *financial inclusion* yang akan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada layanan perbankan. Sebagai salah satu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan," ungkapnya. ■ *Iw/dbs*

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat sangat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM; serta
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

Sasaran PKH

Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, tante/ bibi,

atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH.

Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan:

1. Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar;
2. Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak; dan
3. Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi ibu hamil.

Fokus Utama

Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan).

Seluruh peserta PKH merupakan

penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program Jamkesmas dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu. Karenanya, kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut.

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka.

Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah.

Dalam jangka pendek Program Keluarga Harapan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi karena mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi. ■ Sumber: *Depsos.go.id*



Tim Pansus DPRD Kota Mataram Kunjungi TNP2K

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah tentang penanggulangan kemiskinan kota Mataram. Agar rancangan tersebut dapat efektif dan sinkron dengan program penanggulangan kemiskinan di pusat, para anggota DPRD itu meminta masukan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Sejumlah anggota DPRD Kota Mataram Kamis malam (9/2), mengunjungi kantor Sekretariat TNP2K. Rombongan yang tergabung dalam Tim Pansus Penyusunan Raperda Kota Mataram dipimpin oleh Mishban dari Partai Pemuda Indonesia. Tim itu berjumlah 11 orang, berasal dari berbagai fraksi partai politik.

Kedatangannya disambut oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto dan Kepala

Sekretariat Tonno Supranoto bersama sejumlah anggota Sekretariat TNP2K lainnya.

Kedatangan Tim Pansus tersebut bertujuan untuk meminta masukan dari TNP2K dalam rangka penyusunan raperda tentang penanggulangan kemiskinan kota Mataram, mengingat salah satu tugas utama TNP2K adalah mengoordinasikan kebijakan

dan program penanggulangan kemiskinan agar berjalan secara optimal, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu tugas TNP2K yang lain adalah melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian dan lembaga, serta melakukan pengawasan

dan pengendalian pelaksanaan program maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan. TNP2K dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono, beranggotakan 12 kementerian dan lembaga. Didirikan tahun 2010 sesuai dengan Perpres No. 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam sambutannya Bambang mengatakan bahwa kunjungan delegasi DPRD kota Mataram ini merupakan kehormatan bagi TNP2K. Dan diharapkan kunjungan ini bukan untuk yang pertama kali. Kedepan, interaksi seperti ini harus bisa terus dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah.

Sedangkan Mishban dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas sambutan luar biasa yang diberikan sekretariat TNP2K kepada rombongan. "Kami mengucapkan terimakasih atas penerimaan yang luar biasa di luar dugaan kami. TNP2K telah menerima kami dengan tim yang lengkap," ujarnya.

Selain meminta masukan, kedatangan anggota DPRD Kota Mataram itu juga menyampaikan berbagai permasalahan seputar penanggulangan kemiskinan yang ditemukan dalam penyusunan raperda itu. Hal itu diungkapkan satu persatu oleh para anggota legislatif, baik dari sisi kebijakan maupun implementasi di lapangan.

Dari beberapa catatan yang diuraikan dan ditanyakan, terungkap bahwa hampir 40% jumlah penduduk kota Mataram atau sekitar 158 ribu jiwa masuk dalam kategori masyarakat miskin. Kemudian juga tentang kultur masyarakat yang tiba-tiba merasa miskin ketika bantuan untuk masyarakat miskin



datang, misalnya saat pembagian raskin. Adalagi tentang jumlah masyarakat miskin Kota Mataram yang terus bertambah akibat adanya perpindahan penduduk dari daerah lain.

Bertitik tolak dari berbagai masalah tersebut maka DPRD kota Mataram berinisiatif untuk segera menyusun Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Mataram. Tujuannya adalah agar upaya penanggulangan kemiskinan di daerah itu dapat berjalan efektif dan menyeluruh, sesuai dengan program pemerintah pusat.

Menanggapi hal itu Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto memberikan apresiasi atas keseriusan anggota Pansus untuk menyusun raperda tersebut. Berbagai pertanyaan seputar penanggulangan kemiskinan satu per satu dijawabnya. "Kalau anggota DPRD-nya seperti Bapak-bapak ini, saya harap kemiskinan di Mataram akan cepat hilang," katanya.

Selanjutnya Bambang menjelaskan tentang metodologi awal tentang kriteria kemiskinan. Pertama-tama masalah ukuran



dulu. Penting juga disimak, untuk mendapatkan jumlah orang miskin, ada 2 hal yang diperlukan. Yang pertama distribusi pendapatan, yang diperoleh dari survey SUSENAS. (Menerangkan mengenai angka kemiskinan dari perspektif grafik lonceng). Yang kedua adalah garis kemiskinan itu sendiri. Ada dimana lokasinya pada grafik tadi? Dari sini bisa ditarik jumlah orang miskin. Yang

penting ada kriteria nasional agar satu kabupaten yang lain dapat diperbandingkan. Di Amerika pun seperti itu cara menarik garis kemiskinan.

Akhirnya malam itu jadilah "kuliah" singkat tentang penanggulangan kemiskinan disampaikan Sekretaris Eksekutif TNP2K kepada Anggota Legislatif Pansus Raperda Penanggulangan Kemiskinan Kota Mataram. ■ *Iw/db*s

Anggaran Rehab Gedung SD dan SMP Meningkatkan

Keseriusan pemerintah untuk melakukan pembenahan dibidang pendidikan dasar di Indonesia tercermin lewat upaya merehab seluruh gedung SD dan SMP yang rusak hingga ke pelosok daerah. Tidak tanggung-tanggung anggaran yang dikeluarkan pada tahun ini mencapai Rp.15,882 triliun. Mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2011 yang hanya Rp.1,597 triliun.



Sebuah sekolah yang kondisinya rusak.

Sebanyak 173.344 ruang kelas yang terdiri dari 132.317 ruang kelas SD dan 41.027 ruang kelas SMP di seluruh Indonesia di tahun 2012 akan segera direhab oleh pemerintah. Anggarannya berasal dari APBN sebesar Rp.7,8 triliun dan sisanya Rp.8 triliun diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Persiapan itu kini sedang dilakukan dan baru pada bulan Juli kegiatan fisiknya dimulai. Namun kegiatan itu diharapkan tuntas pada Oktober 2012 agar tidak mengganggu proses wajib belajar nasional 9 tahun.

Hal itu terungkap dalam rapat Komite Pendidikan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres pada Selasa lalu (14/2). Rapat itu merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya dibulan September 2011 lalu. "Kini saya ingin mengecek pelaksanaannya, apakah program ini tepat sasaran,

baik dalam hal penggunaan dana maupun pemilihan sekolah yang mendapat perbaikan," kata Wapres saat membuka rapat.

Rapat dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita D. Tuwo, serta para pejabat eselon I dari berbagai kementerian.

Di hadapan Wapres, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2011, Pemerintah Pusat merehabilitasi 21.500 ruangan SD dan SMP yang rusak berat (SD 18.000 ruang dan SMP 3.500 ruang) dengan total anggaran Rp.1,597 triliun (SD Rp.1,275 triliun dan SMP Rp.322

miliar). Dari rencana rehabilitasi ruang SD dan SMP sebanyak ini, yang sudah selesai 100% tercatat sebesar 32,5 %, yang tersebar di 1.167 Sekolah. "Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP yang masuk tahun anggaran 2011 akan selesai seluruhnya pada akhir Maret 2012," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh.

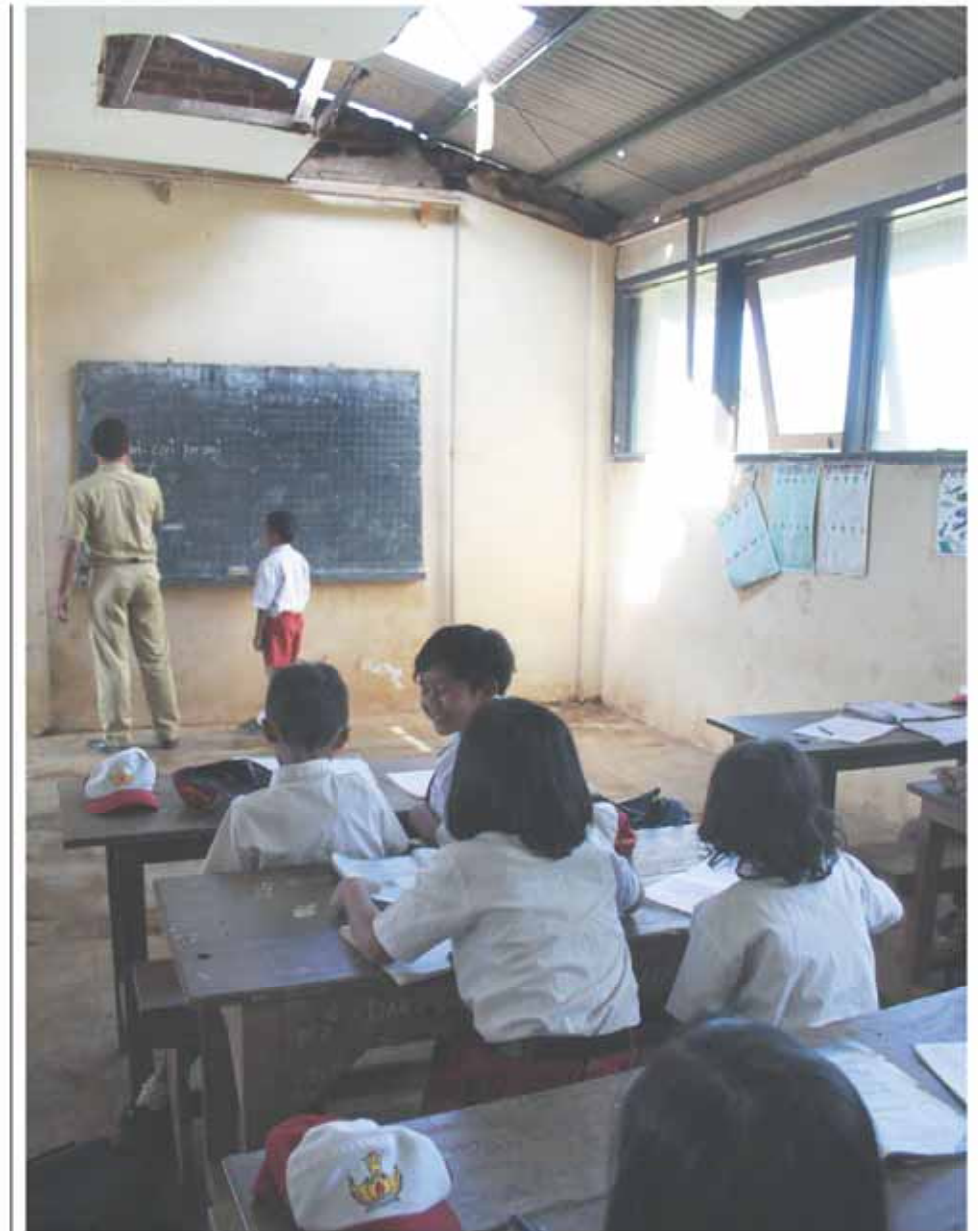
Sedangkan untuk tahun anggaran 2012 pemerintah akan merehabilitasi 173.344 ruang kelas (untuk SD 132.317 ruang dan SMP 41.027 ruang) dengan total anggaran Rp.15,822 triliun (untuk SD Rp.12,04 triliun dan SMP Rp. 3,78 triliun). Dari total anggaran ini, Rp.7,8 triliun di antaranya berasal dari APBN 2012 dan sisanya Rp.8 triliun berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Saat ini, persiapan untuk melaksanakan rehabilitasi ini sedang berjalan. Kegiatan fisiknya sendiri akan dimulai bulan Juli dan direncanakan akan

tuntas pada Oktober 2012.

Menurut Mendikbud, dana untuk 2012 sudah tersedia dan siap dikirim. Rehabilitasi akan dilakukan dengan sistem swakelola oleh masing-masing sekolah. *Monitoring* dilakukan melalui sistem *online* dan layanan pesan singkat telepon genggam. Setiap sekolah juga telah memiliki identitas koordinat sehingga bisa dicek langsung melalui foto satelit. Fokus rehabilitasi diberikan pada gedung SD dan SMP mengingat program wajib belajar nasional 9 tahun.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga membentuk tim pendampingan untuk membantu sekolah yang menerima alokasi dana rehabilitasi. Anggota tim pendampingan ini berasal dari perguruan tinggi, TNI, BPKP, serta SMK yang memiliki jurusan teknik bangunan. Tim ini bertugas memberikan pendampingan teknis maupun administratif untuk pelaksanaan rehabilitasi itu.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat HR. Agung Laksono yang hadir dalam rapat tersebut memberikan apresiasi atas kemajuan pelaksanaan rehabilitasi ruang sekolah. Untuk itu, dia meminta Mendikbud terus memonitor secara lebih terperinci pelaksanaan rehabilitasi ini. Terutama, dalam hal spesifikasi dan kualitas gedung agar hasil rehabilitasi ini tidak cepat rusak. Selain itu, target rehabilitasi 2011 dan 2012 adalah ruang kelas yang rusak berat. Sedangkan menurut pemantauan di lapangan, masih banyak ruang yang tergolong rusak sedang dan belum mendapat giliran rehabilitasi. "Rehabilitasi ruang yang rusak sedang harus mulai kita rencanakan, sebelum yang rusak sedang menjadi semakin rusak dan akhirnya



Sebuah sekolah yang kondisinya rusak.

masuk kategori rusak berat," tutur Agung.

Sedangkan Kuntoro Mangkusubroto selaku Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyampaikan apresiasi karena Kemendikbud sudah berhasil memantau secara terperinci ruang kelas yang rusak berat. Pemantauan ini mencakup data yang sangat detail, termasuk

koordinat dan laporan visual.

"Sebagai alat analisis, UKP4 berharap seluruh data bisa disalurkan ke ruang monitor di pusat data di Bina Graha sehingga bisa langsung dilihat Presiden maupun Wakil Presiden," tuturnya. Hasil pemantauan sekolah ini juga sudah mencakup seluruh madrasah yang berada di bawah pengawasan Kementerian Agama.

■ Iw/Setwapres.go.id



Teddy Sutadi Kardin

“Mpu” Pisau Indonesia

Teddy Sutadi Kardin bukan Empu Gandring, tapi kemampuannya tak kalah dengan pakar keris yang tewas termakan karyanya sendiri.

Seperi Empu Gandring, Teddy Sutadi Kardin, pendiri perusahaan dengan nama T. Kardin Pisau Indonesia ini memang ahlinya menciptakan senjata tajam. Bukan keris, melainkan berbagai jenis pisau seperti Survival Knife, Skinner, Kukri, Commando, Special Force, Hunting Knife, Golok, Katana, termasuk pisau-pisau tradisional seperti Kujang, dan Rencong. Kualitas, ketajaman, kekuatan, keindahan dan kerapihan dalam pengerjaan membuat nama pisau buatan Teddy Kardin melekat di hati para penggemar pisau, khususnya di Indonesia. Di mancanegara, merek T. Kardin juga dikenal sebagai penghasil pisau berkualitas asal Indonesia.

Mengawali bisnisnya berdasarkan hobi, Teddy mengaku sangat mengagumi pisau “Menurut saya, pisau itu salah satu alat bantu yang simpel dan multifungsi. Tidak saja berguna tetapi juga indah,” ujarnya. Selain itu, Teddy juga mengatakan bahwa



Berangkat dari hobi dan aktivitas Teddy sukses bisnis senjata.

pisau merupakan kebutuhan dalam menjalankan hobi dan profesinya. “Sebagai anggota Wanadri dan geolog, saya sering keluar masuk hutan, dan pisau menjadi kebutuhan yang penting,” ungkap alumni Teknik Geologi ITB ini.

Tak Bisa Lepas Dari Pisau

Pria yang pernah aktif di Pramuka dan Resimen Mahasiswa ini lebih memilih bekerja sesuai bidangnya di perusahaan minyak dan tambang. Sebagai peneliti

geologi, Teddy kerap menjelajahi hutan untuk berburu sumber minyak. Hampir seluruh hutan di Indonesia pernah ia tembus bersama pisau Buffalo Skinner kesayangannya. Pekerjaan dan kegiatannya menuntut Teddy tak pernah bisa jauh dari pisau. Maka tak aneh jika kemudian pisau kesayangannya rompal dimakan usia dan pemakaian.

Enggan beralih ke lain pisau, Teddy memilih memperbaiki sendiri pisaunya jika ada kerusakan

Berulang kali memperbaiki pisaunya, kerusakan selalu saja terjadi. Alih-alih membeli baru, Teddy mencoba untuk membuat sendiri pisau yang sesuai dengan kebutuhannya.

“Mau beli lagi tetapi mahal, sehingga akhirnya saya berpikir kenapa tidak membuat sendiri saja,” tutur Teddy. Hasil yang bagus membuat Teddy dibanjiri pesanan dari kawan-kawannya sesama penempuh rimba. Dari situ, ia pun mulai merintis usaha pembuatan senjata tajam sejak tahun 1993.

Bahan Kualitas Terbaik

Demi mendapatkan pisau yang bagus Teddy berkomitmen untuk menggunakan bahan yang berkualitas tinggi begitupula dalam hal produksi. “Bahan baku untuk pembuatan pisau yang digunakan saat ini adalah O1, D2, 440C, ATS-34 standar AISI (American Iron and Steel Institute) serta baja Damaskus,” papar Teddy. Jika kita lihat sepiantas, pisau yang menggunakan baja Damaskus pasti mengingatkan kita pada bilah keris.

Di bengkel kerja T. Kardin, bahan-bahan tersebut diolah secara sederhana dengan peralatan yang bisa dibilang jauh dari teknologi yang super canggih. Namun dengan begitu, Teddy justru lebih mudah mengontrol kualitas setiap bilah pisau yang diproduksinya. “Kebanyakan dalam proses pembuatan dilakukan secara *handmade* oleh 30 orang karyawan,” tukas Teddy.

Sementara untuk desain pisaunya masih dirancang sendiri oleh Teddy. Berdasarkan pengalaman dan kecintaannya pada pisau.

Untuk menjaga keaslian dan kualitas produk, Teddy hanya memfokuskan pembuatan dan penjualan di satu titik, yaitu di *workshop* sekaligus *showroom*-nya di Jl Hegarmanah 46, Bandung. Meski tak mau membuka omset dari produksi pisaunya, Teddy menyatakan pemasukannya dari penjualan pisau dengan kisaran harga mulai Rp 100 ribu hingga Rp10 jutaan saat ini cukup untuk menggaji karyawannya.

Berkibar Hingga USA

Aktivitasnya di Wanadri membuat Teddy akrab dengan kalangan militer. Bahkan ia kerap dipercaya mengajarkan teknik navigasi bagi para prajurit. Tak heran jika kemudian di *workshop*-nya, Teddy juga melayani pembuatan pisau untuk kebutuhan perbekalan militer dan polisi. Pernah anggota kehormatan Kopassus ini diminta memberikan pembekalan skenario survival dan penjejak dalam latihan gabungan Kopassus dengan Special Forces asal Amerika Serikat.

Seusai latihan gabungan tersebut, Prabowo Subianto, yang waktu itu menjabat sebagai Danjen Kopassus, memberikan pisau buatan Teddy kepada delegasi dari Special Forces sebagai suvenir dari Kopassus. “Mereka tertarik karena ternyata di Indonesia ada pisau yang bagus, dan akhirnya mereka datang ke *workshop*



Jaga kualitas dengan *handmade*.

saya dan membeli semua stok yang ada di etalase. “Kepuasan pasukan elite Paman Sam tersebut tergambarkan dalam sertifikat yang menyatakan apresiasi mereka terhadap produk T. Kardin. Rahasia kesuksesan Teddy dibangun dengan satu keyakinan bahwa, “Semua harus dilakukan dengan kesungguhan dan usaha yang kuat.” ■ Irwansyah

BATIK TAK LUNTUR OLEH WAKTU

Di Jawa pengguna pakaian batik itu dapat dibedakan dari coraknya. Corak batik pakaian masyarakat umum berbeda dengan corak batik yang dikenakan raja dan keluarganya.



Batik pada awalnya merupakan bagian dari seni menggambar di atas helaian daun lontar. Dikenal di Indonesia sejak jaman kerajaan Jawa di abad XVII.

Corak gambar batik pertama kali didominasi oleh gambar binatang dan tumbuhan, baru kemudian berubah ke arah gambar-gambar yang abstrak. Misalnya gambar relief candi, wayang, awan dan sebagainya. Selanjutnya motif gambar batik mengalami perubahan yang mengarah pada filosofi dan budaya daerah masing-masing. Media yang digunakan tidak lagi daun-daun lontar melainkan keatas selembar kain putih.

Seni membatik di atas kain putih itu kemudian menghasilkan

lembaran kain yang indah. Sehingga menjadi pakaian kebudayaan oleh raja-raja di Jawa pada waktu itu. Seni membatik awalnya hanya dilakukan oleh kalangan dalam kerajaan. Kemudian menjalar kepada para pengikut kerajaan dan masyarakat umum.

Namun penggunaan pakaian batik itu dapat dibedakan dari coraknya. Corak batik pakaian masyarakat umum berbeda dengan corak batik yang dikenakan raja dan keluarganya. Selain itu dapat juga dilihat dari kualitasnya.

Di awal abad ke XIX, kesenian membatik mulai menyebar keseluruh nusantara dan menjadi pakaian tradisional bangsa Indonesia. Misalnya batik dari Sulawesi,

Kalimantan, Sumatera, Papua, Jawa Barat. Semuanya memiliki corak dan motif yang berbeda sesuai dengan adat dan budaya setempat.

Sekarang, batik sudah menjadi pakaian resmi dalam setiap acara. Siapapun boleh memakainya tanpa harus membedakan kelas sosial. Motif dan coraknya juga sudah beraneka ragam.

Kini pakaian batik dapat ditemui di semua pusat perbelanjaan. Dijual mulai dari kaki lima hingga di pusat perbelanjaan modern. Bahkan banyak juga butik-butik yang mengkhususkan menjual pakaian bercorak batik. Harganya pun bervariasi menurut kualitasnya. Oleh karenanya batik tak luntur oleh waktu. ■



Koleksi batik di sebuah museum



Bermacam-macam alat untuk membuat batik



Pasar Lawang Sembalun di kaki gunung Rinjani

begitu menarik bagi warga yang tinggal di daerah potensi wisata.

Dari, oleh, dan untuk Masyarakat

Harus diakui masyarakat selama ini tidak diposisikan sebagai pelaku penting industri pariwisata. Karena, walau selama ini mereka berperan sebagai penjaga dan pemilik sah objek wisata, mereka tetap harus mengalah ketika ada investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya. Namun dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat terkandung di dalamnya adalah konsep pemberdayaan masyarakat. Tentu saja pemberdayaan ini harus sejalan dengan karakteristik dari masyarakat yang mempunyai ciri, latar belakang, dan pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi suasana, atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Dan yang pasti tanpa mengganggu keharmonisan yang telah terjaga selama ini.

Selain itu, pariwisata berbasis masyarakat mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat atau warga setempat untuk memainkan peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan, mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka. Warga atau masyarakat tak perlu banyak melakukan perubahan karena sesungguhnya kondisi alam, kebudayaan dan kehidupan alami mereka sebagai masyarakat adalah bagian dari atraksi wisata yang ditawarkan.

Seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat membangun kemitraan dengan Taman Nasional, sektor publik dan

pariwisata yang terkait dengan pariwisata Lombok, dengan membentuk sebuah koperasi dan mendirikan RTC (*Rinjani Trek Center*) di Senaru, dan *Rinjani Information Center* di Sembalun Lawang. Masing-masing mengelola sistem reservasi, pemanduan, porter, kegiatan desa wisata, dan penjualan kerajinan. RTC bertugas mengatur transportasi ke Senaru atau Sembalun Lawang dari Mataram atau wilayah lain di Lombok. Kedua desa ini, dapat dicapai dengan mobil pribadi atau kendaraan umum atau dengan bus umum.

Hasil dan pendapatan dari kegiatan pariwisata dan tiket masuk ke kawasan ini kemudian digunakan untuk kepentingan konservasi, pelatihan, dan membantu Taman Nasional dalam pemeliharaan trek di Rinjani, sehingga pariwisata di kawasan ini dapat berkelanjutan. Dalam operasional sehari-hari masyarakat dan Balai Taman Nasional bersinergi lewat Konsorsium Badan Pengelola Trek Rinjani, yang terdiri dari pemerintah pusat (Taman Nasional), pemda (dinas pariwisata), sektor swasta dan wakil dari masyarakat.

Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat di Desa Kemawi, kecamatan Somagede, Banyumas, Jawa Tengah. Mereka memang telah lama mendambakan daerahnya sebagai obyek wisata. Ketika Pemda Banyumas tengah mengkonsep program wisata di daerah mereka, masyarakat dan aparat desa segera memulai usaha-usaha menjadikan Curug Gumawang sebagai obyek wisata. Malah, sebanyak 24 warga desa Kemawi dengan sukarela tanpa ganti rugi membebaskan tanahnya untuk dijadikan jalan menuju curug selebar 4 m dan



Warga di sekitar Taman Rinjani turut aktif mengantar wisatawan dan mengatur transportasi bagi pengunjung.

Objek Wisata Berbasis Masyarakat

Selama ini masyarakat hanya menjadi penonton atau peran pembantu pada pengelolaan pariwisata di tanahnya sendiri. Tapi lewat pengembangan objek wisata berbasis masyarakat, gunungnya sendiri.

Tak diragukan lagi Indonesia memiliki kondisi alam yang begitu indah hingga menarik minat wisatawan mancanegara untuk hadir menikmatinya. Mulai dari pesisir pantai hingga puncak gunung, semua bisa dijadikan sebagai objek wisata yang menarik. Bukan hanya Bali. Sebenarnya masih banyak bahkan jika kita mau optimis hampir seluruh wilayah

Indonesia memiliki potensi wisatanya masing-masing.

Apalagi berdasarkan data pemeringkatan daya saing kepariwisataan dunia versi World Economic Forum (WEF) dalam rentang waktu selama tiga tahun 2008-2010, posisi Indonesia mengalami pergerakan menanjak. Sempat turun dari posisi 80 (2008) menjadi 81 (2009), terakhir naik ke urutan 74 (2010). Seperti yang disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu dalam Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) II di Makassar, Jumat, 10 Februari silam. Dalam kesempatan itu, Mari juga menyampaikan bila dibandingkan negara-negara lain di kawasan

Asia Tenggara, peringkat tersebut menempati posisi ketiga setelah Singapura (10) dan Malaysia (35). Posisi ke-74 Indonesia masih lebih baik ketimbang Vietnam (80) dan Filipina (94). Swiss menempati urutan pertama dan Amerika Serikat di peringkat keenam dalam catatan WEF 2010.

Sayangnya industri pariwisata kita masih belum menyentuh masyarakat, karena kebanyakan hanya dikuasai oleh investor yang rata-rata bukan putra daerah. Padahal seharusnya masyarakat sekitar berhak untuk lebih menikmati hasil dari pengembangan wilayahnya sendiri. Oleh sebab itu, wacana tentang pembentukan objek wisata berbasis masyarakat menjadi

oleh, dari, dan untuk masyarakat secara partisipatif muncul sebagai alternatif terhadap pendekatan pembangunan yang serba sentralistik dan bersifat *top down*. Dengan begitu masyarakat benar-benar merasa sebagai bagian dan berkepentingan terhadap kelangsungan tempat wisata tersebut.

Dukungan UNWTO

Wacana pariwisata berbasis masyarakat dan berkesinambungan ini sebenarnya juga bukan hal yang baru bagi para pelaku industri pariwisata. Karena wacana ini telah berhembus sejak lama dan menjadi trend tersendiri di Amerika dan Eropa. Hal ini disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dunia tentang pentingnya menjaga kehidupan alam dan budaya yang ada. Dunia telah menyadari, bahwa persoalan lingkungan tidak berdiri sendiri. Namun ada persoalan lain yang juga menjadi bagian dari persoalan kerusakan lingkungan, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari situlah kemudian wisata berbasis masyarakat dan berkesinambungan menjadi pilihan bagi wisatawan mancanegara. *United Nation World Tourism Organization (UNWTO)* atau organisasi pariwisata dunia di bawah PBB sendiri telah mendukung program ini. Pada pertengahan Januari silam digelar pertemuan antara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu dengan Sekretaris Jenderal UNWTO, Thalib Rifai. Pertemuan ini membahas pariwisata berbasis masyarakat dan berkesinambungan. "Pertemuan bilateral juga ikut menyempurnakan data dan informasi kepariwisataan," kata Mari Elka Pangestu kepada wartawan.

Mari mengatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan penghargaan atas dukungan UNWTO yang merehabilitasi penataan pembangunan di Pangandaran pasca tsunami tahun 2006 sebagai bagian dari pembangunan pariwisata berkesinambungan.

"Rehabilitasi yang dilakukan berbasiskan kepada pemberdayaan masyarakat," katanya.

Ia juga menambahkan, pengembangan kepariwisataan di Indonesia akan direncanakan lebih terpadu, menyeluruh dan melalui pendekatan *Destination Management Organization (DMO)*.

Optimis, program pariwisata berbasis masyarakat dan berkesinambungan ini mampu menaikkan angka wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Jika pada Januari 2009 sampai Oktober 2011, terjadi kenaikan sekitar 200 ribu turis (dari awalnya kedatangan turis 450 ribu orang lebih menjadi 650 ribu lebih). Maka ke depannya angka tersebut akan mengalami kenaikan hingga jutaan kunjungan turis mancanegara. Sementara bagi masyarakat sendiri program ini mampu menjadi solusi bagi mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan dan mampu menjadi Tuan di daerahnya sendiri. Sebagaimana warga Pangandaran yang menjadi Tuan di Pantainya sendiri. ■ in

Pantai Pangandaran

